

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM SYĀFI'Ī TENTANG
ZAKAT HARTA PIUTANG**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syariah



Oleh

AGUNG TRI PRATAMA

1521030449

Jurusan: Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

**FAKULTAS SYARIA'H
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM SYĀFI'Ī TENTANG
ZAKAT HARTA PIUTANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syariah**

Oleh

AGUNG TRI PRATAMA

1521030449

Jurusan: Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)



Pembimbing I : Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom. I

PembimbingII : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

FAKULTAS SYARIA'H

UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H/ 2019 M

ABSTRAK

ANALISIS PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM SYĀFI'Ī TENTANG ZAKAT HARTA PIUTANG

Oleh :

Agung Tri Pratama

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakkī*), (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Selain itu zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat diwajibkan apabila telah memenuhi syarat wajib yang antara lain, hendaklah beragama Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, mencapai *nishāb* dan mencapai *haul*. Berdasarkan syarat wajib itulah terjadi perbedaan antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang kewajiban zakat atas harta piutang. Menurut Imam Mālik, harta piutang tidak diwajibkan zakat setiap tahunnya dan menurut Imam Syāfi'ī, harta tersebut wajib dizakatkan setiap tahunnya. Dari perbedaan pendapat inilah perlu dan menarik untuk dikaji untuk dilakukan penelitian tentang pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang zakat harta piutang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apa perbedaan dan persamaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang zakat harta piutang. Dan apa penyebab yang melatarbelakangi perbedaan pendapat di antara kedua imam mazhab tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan serta perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang zakat harta piutang. Dan untuk mengetahui penyebab perbedaan antara kedua imam tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang zakat harta piutang.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa, persamaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang zakat piutang yaitu, Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī berpendapat, bahwa piutang *marjū' al-adā'* merupakan piutang yang wajib dizakatkan, akan tetapi piutang *ghairu marjū' al-adā'* tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Bahwasanya, zakat diwajibkan atas seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai kadar *nishāb*. Dan zakat diwajibkan atas seseorang yang memiliki harta yang berstatus *milk al-tām* (kepemilikan sempurna atau penuh) dan *māl al-Nām* (harta yang berkembang).

Perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang zakat piutang yaitu, menurut pandangan Imam Mālik, bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi harta piutang. Karena harta piutang tidak termasuk dalam status *al-milk al-tām*. Sedangkan, menurut pandangan Imam

Syāfi'ī, bahwa harta piutang masih termasuk dalam status *al-milk al-tām*. Imam Mālik beristidlāl dengan mengqiyāskan piutang dengan zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Sedangkan, Imam Syāfi'ī mewajibkan zakat atas zakat piutang beliau beristidlāl dengan mengqiyāskannya dengan zakat *al-tijārah* (harta perniagaan). Dan Imam Mālik berpendapat bahwa bagi harta piutang hanya diwajibkan satu kali zakat saja apabila harta piutang tersebut telah ia terima dari penghutang. Sedangkan pendapat Imam Syāfi'ī bahwa harta piutang wajib dikeluarkan setiap tahunnya.

Penyebab yang melatarbelakangi perbedaan antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī yaitu, perbedaan antara kedua imam mazhab dalam memahami *al-Qur'ān* dan *qāidah-qāidah ushūliyyah* atau *fiqhiyyah*, perbedaan dalam mengartikan *milk al-tām*, perbedaan tentang *al-maqīs 'alaih* (yang diqiyāskan kepadanya), perbedaan tentang rahasia dan tujuan zakat, perbedaan pendapat tentang objek zakat.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Agung Tri Pratama
NPM : 1521030449
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Analisis Pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī
Tentang Zakat Harta Piutang

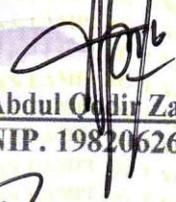
MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

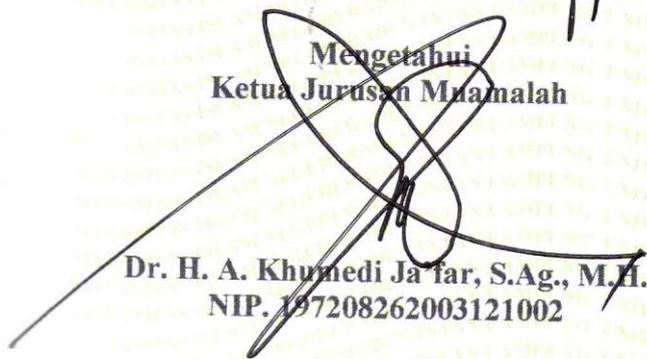
Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom. I
NIP. 1954111319850310001


Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 19820626200901015

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamsyah Jl. Let. Kol. Hl. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī Tentang Zakat Harta Piutang**, disusun oleh **Agung Tri Pratama NPM. 1521030449** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari tanggal: **Rabu, 12 Juni 2019, pukul 08.00 s/d 10.00 WIB** di **Ruang Sidang III Fakultas Syari'ah**.

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag.

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun., S.H., M.A.

(.....)

Penguji II : Drs. M. Said Jamhari, S.H.I, M.Kom.I.(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al-Taubah: 103).¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Suara Agung, 2008), h. 372.

PERSEMBAHAN

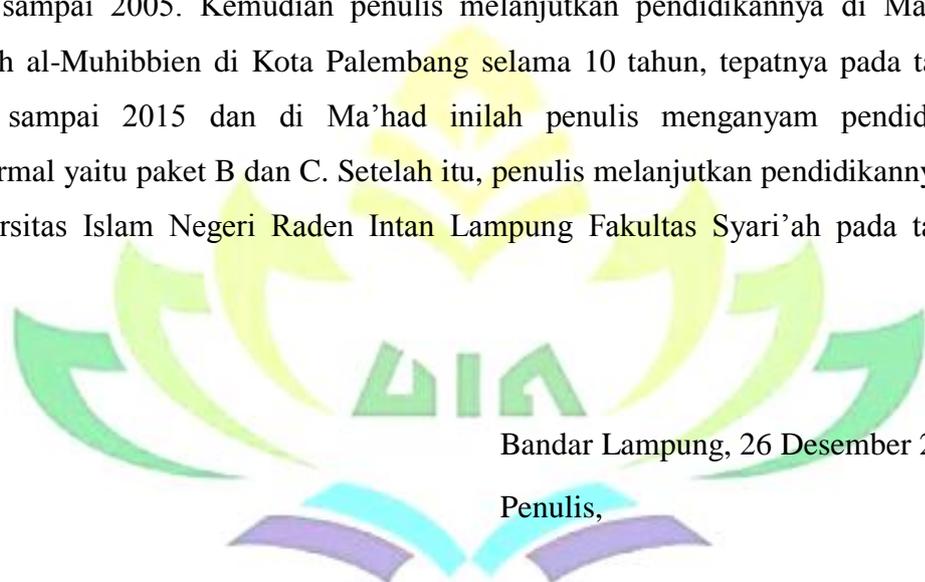
Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Joko Trianto, S.T yang selalu berjuang, membanting tulang siang dan malam tanpa mengenal rasa lelah demi masa depan anaknya dan ibunda Nurmawati yang baik, pemaaf, suci hatinya dan yang selalu mendoakan anaknya di saat suka maupun duka.
2. *Mudīr al-Ma'had* Rubath al-Muhibbien, *Sayīdi al-Wālid* Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad Syahab yang telah mendidik setiap waktu tanpa kenal lelah dan memberikan ilmunya bahkan hartanya untuk para santri-santrinya. *Al-Syekh al-Murabbī al-Rūh*, al-Ustādz Muhammad Syukri bin 'Ali Syahab dan al-Ustādz Hazwan.
3. *Mudīr al-Ma'had* Darul Ma'arif, al-Habīb Ahmad Ghazali bin Abdullah al-Saggaf, yang selama ini selalu mengajak penulis berdiskusi tentang *fiqh al-Muqāranah*.
4. Istriku tercinta Anis Faizah, yang selama penulisan karya ilmiah ini, dialah selalu menemani, memberikan semangat dan motifasi sehingga karya ini selesai di waktu yang tepat.
5. Adik-adikku yang tercinta Astri Dwi Ambarwati, S.Pdi, Muhammad Abdul Fattah dan Annisa Salsabila terima kasih atas semua dukungan, semangat dan kasih sayangnya.

RIWAYAT HIDUP

Agung Tri Pratama lahir di Kota Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 10 Oktober 1993. Terlahir dari pasangan Joko Trianto dan Nurmawati. Anak sulung dari empat bersaudara.

Penulis menempuh jenjang pendidikannya di Sekolah Negeri 95 Palembang di kelas 1 dan melanjutkan banggu sekolahnya di Taman Siswa selama 2 tahun yaitu pada tahun 2000 sampai 2002 kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtida'iyah Negeri I Teluk Betung Bandar Lampung (yang sekarang menjadi Madrasah Ibtida'iyah Negeri II Teluk Betung) selama 3 tahun yaitu, pada tahun 2002 sampai 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Ma'had Rubath al-Muhibbien di Kota Palembang selama 10 tahun, tepatnya pada tahun 2005 sampai 2015 dan di Ma'had inilah penulis menganyam pendidikan nonformal yaitu paket B dan C. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada tahun 2015.



Bandar Lampung, 26 Desember 2018

Penulis,

Agung Tri Pratama
NPM. 1521030449

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah S.W.T, puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ANALISIS PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM SYĀFI’Ī TENTANG ZAKAT HARTA PIUTANG” dapat diselesaikan. Dan shalawat beserta salam disampaikan kepada Rasulullah S.A.W, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. H. A. Khumedi Ja’far S.Ag. M.H. dan Khoiruddin M.S.I selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom. I selaku pembimbing Akademik I dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Keluarga besar Muamalah B angkatan 2015.

8. Rekan-rekan KKN kelompok 54 di Desa Puji Rahayu Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah S.W.T penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Āmīn.

Bandar Lampung, 27 Desember 2018

Penulis,

Agung Tri Pratama
NPM. 1521030449



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Ketentuan Umum Tentang Zakat	
1. Pengertian Zakat	17
2. Dasar Hukum Zakat.....	20
3. Syarat Wajib dan Sah Zakat	23
4. Harta yang Wajib Dizakatkan.....	30
5. Golongan Penerima Zakat	44
B. Ketentuan Umum Hutang Piutang	
1. Pengertian Hutang Piutang	52
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	54
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	56

4. Hikmah dan Manfaat Disyariatkannya Transaksi Hutang Piutang	57
--	----

BAB III. PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG ZAKAT BAGI HARTA YANG TERHUTANG

A. Imam Malik.

1. Biografi Imam Mālik dan Latar Belakang Pendidikannya	59
2. Pola Pemikiran dan Metode <i>Istidlāl</i> Imam Mālik	61
3. Karya Serta Murid Imam Mālik Serta Perkembangan Mazhabnya	69
4. Pendapat Imam Mālik Tentang Zakat Bagi Harta Piutang	72

B. Imam Syāfi'ī.

1. Biografi Imam Syāfi'ī dan Latar Belakang Pendidikannya	75
2. Pola Pemikiran dan Metode <i>Istidlāl</i> Imam Syāfi'ī	78
3. Karya dan Murid Imam Syāfi'ī	84
4. Pendapat Imam Syāfi'ī Tentang Zakat Bagi Harta Piutang	87

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Persamaan Pendapat Antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī Tentang Zakat Harta Piutang	90
B. Perbedaan Pendapat Antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī Tentang Zakat Harta Piutang	91
C. Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī Tentang Zakat Harta Piutang	93

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.

Dipandang, perlu adanya uraian agar tidak mengalami disinterprestasi atau salah penafsiran mengenai skripsi ini, maka sebagai kerangka awal akan dijelaskan secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan isi skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī Tentang Zakat Harta Piutang”.

1. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb).²
2. Pendapat, adalah pikiran; anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa) kemudian menyimpulkan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya).³
3. Imam Mālik, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Imam yang besar dari kota Madinah dan Imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli *fiqh* yang terakhir bagi kota Madinah dan juga terakhir bagi *fuqahā’* Madinah.⁴
4. Imam Syāfi’ī yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan imam yang ketiga menurut susunan *tārikh* kelahiran yang lahir pada tahun 105 H.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Ibid*, h. 1031.

⁴Ahmad al-Syurbasī, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2008), h. 71.

Beliau adalah pendukung terhadap ilmu *hadīts* dan pembaharu dalam agama (*mujaddid*) dalam abad kedua Hijriyyah.⁵

5. Kewajiban Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah S.W.T yang dikeluarkan seseorang (*muzakkī*) kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.⁶
6. Piutang, adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang)⁷ atau hak untuk menerima pembayaran.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah menganalisis pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang zakat bagi harta piutang, yang kemudian akan dikomparasikan di antara kedua Imam tersebut.

B. Alasan Memilih Judul.

Adapun alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Obyektif
 - a. Karena zakat wajib dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki harta dengan kriteria kepemilikan penuh (*milkiyyat al-tāmmah*), sampainya *nishāb* (*bulūgh al-nishāb*) dan mencapai satu tahun (*haul*). Dan terjadi perbedaan pendapat mengenai zakat bagi harta piutang yang dipandang oleh Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī.

⁵*Ibid*, h. 139.

⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977), h. 5.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 1083.

⁸Viswandro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 150.

- b. Karena sejauh literatur yang penulis baca, belum pernah ditemukan perbedaan pendapat antara empat imam mazhab tentang zakat harta piutang yang membahas secara *sharīh* (jelas), kecuali perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī.
 - c. Karena pernah bahkan sering terjadi perbedaan pendapat antara imam mazhab dan penganut mazhabnya, seperti perbedaan pendapat antara Imam Syāfi'ī dan Imam Nawawī dalam permasalahan *furū'iyah/ 'amaliyyah*. Oleh karena itu penulis lebih tertarik untuk menitikfokuskan pembahasan ini terhadap pendapat individual antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī.
 - d. Karena judul skripsi ini belum pernah dibahas, oleh karena itu perlu untuk mengkaji dan membahasnya.
2. Alasan Subjektif
- a. Dari aspek yang diteliti oleh penulis mengenai permasalahan tersebut serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangatlah memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
 - b. Menurut penulis kajian yang berhubungan dengan judul skripsi ini belum banyak yang mengkaji oleh karena itu perlu untuk mengkajinya serta judul yang akan diangkat ada relevansinya dengan jurusan Mu'amalah.

C. Latar Belakang Masalah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, zakat juga merupakan pilar utama ajaran Islam ketiga setelah dua kalimat syahadat dan salat.⁹ Hal ini

⁹Syaikh Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, terjemahan Abū Syafiq dkk (Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2013), h. 145.

sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Umar bin Khattāb:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹⁰

“Islam dibangun atas lima perkara (rukun), yaitu dua kalimat syahadat, yakni mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadhan” (H.R. Bukhārī).

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakkī*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹¹ Selain itu zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā’iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang kuat dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah moral spiritual dan *ukhrawī*, melainkan juga nilai-nilai ekonomi duniawī.¹²

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam, sesuai dengan nama zakat itu sendiri di samping *al-thathīr* atau mensucikan terhadap harta dan pemiliknya, juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan

¹⁰Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī* (Damaskus: Dar Ibn Katsīr, 2002), h. 12.

¹¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 9.

¹²Masnun Tahir & Suziana Elly Triantini, “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204>. (28 Mei 2018), h. 509.

masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habl min Allah* (hubungan secara vertikal) dan dimensi *habl min al-nās* (hubungan secara horizontal).¹³ Adapun hikmah dalam berzakat baik yang berhubungan dengan manusia dan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan, antara lain:

Pertama, zakat merupakan salah satu sifat orang-orang baik yang menjadi penghuni surga. Allah S.W.T berfirman:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَأَخِذِينَ مَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ
مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِلَآئِحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي
أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air. 16. sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. 17. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. 18. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Al-Dzariyyat: 15-19).

Kedua, zakat merupakan salah sifat orang-orang beriman yang berhak menerima rahmat Allah S.W.T. *Ketiga*, Allah S.W.T menumbuhkembangkan harta zakat bagi orang yang membayarkannya. *Keempat*, zakat adalah sebab turunnya berbagai kebaikan, dan sebaliknya tidak mengeluarkannya menjadi sebab terhalangnya berbagai kebaikan. *Kelima*, zakat menghapuskan kesalahan dan

¹³Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2001), h. 41.

dosa-dosa. *Keenam*, zakat mensucikan akhlak pembayarnya dan melapangkan dadanya.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh *al-Qur'ān*, *al-Sunnah*, dan *ijmā'* (kesepakatan) ulama. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban yang mutlak bagi golongan orang yang telah memenuhi kriteria kewajiban berzakat, anjuran untuk menunaikan zakat sangatlah tegas, bahkan *al-Qur'ān* sendiri menyebutkan 30 kali dan 27 kali di antaranya disebutkan beriringan dengan kata salat.¹⁵ Karena itu, Khalīfah Abū Bakar al-Shiddīq bertekad memerangi orang-orang yang salat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan kewajiban zakat adalah suatu kedurhakaan, bahkan sampai kepada tingkatan kekufuran. Sebagaimana firman Allah S.W.T:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat...” (Q.S Al-Baqarah: 110).

Imam al-Ghazālī mengatakan: Allah dan Rasul-Nya membuat syari'at dengan beberapa tujuan (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu:

1. *Hifz al-dīn*, untuk memelihara agama.
2. *Hifz al-'aql*, untuk menjaga akal.
3. *Hifz al-nafs*, untuk menjaga jiwa.

¹⁴Syaikh Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālīm, *Loc.Cit.*,

¹⁵Nasruddin & Dewani Romli, “Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. X, No. I, 2011, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2011, (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/241>. (28 Mei 2018), h. 77.

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Loc.Cit.*,

4. *Hifz al- nasl*, untuk menjaga keturunan.

5. *Hifz al- māl*, untuk menjaga harta.

Jika rumusan al-Ghāzālī ini dikaitkan dengan turunnya perintah zakat, maka kewajiban berzakat itu, paling tidak dimaksudkan untuk menjaga tiga persoalan pokok. Ketiga persoalan itu adalah *hifz al dīn*, untuk memelihara agama, *hifz al nafs*, untuk menjaga jiwa, dan *hifz al māl*, untuk menjaga harta.¹⁷

Selanjutnya, para ulama' berbeda pendapat tentang zakat bagi harta piutang. Syekh Muhammad al-Madanī dalam bukunya *asbāb ikhtilāf al-fuqahā'*, membagi sebab-sebab *ikhtilāf* itu kepada empat macam, yaitu:

1. Pemahaman *al-Qur'ān* dan *al- Sunnah* Rasulullah S.A.W.
2. Sebab-sebab khusus tentang *al- Sunnah* Rasulullah SAW.
3. Sebab-sebab yang berkenaan dengan *qāidah-qāidah ushūliyyah* atau *fiqhiyyah*.
4. Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar *al-Qur'ān* dan *Sunnah* Rasulullah S.A.W.¹⁸

Secara etimologis *fiqhiyyah*, *ikhtilāf* merupakan term yang diambil dari bahasa Arab yang berarti: berselisih, tidak sepaham, sedangkan secara terminologis *fiqhiyyah*, *ikhtilāf* adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama' *fiqh* sebagai hasil *ijtihād* untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Dengan demikian masalah *ikhtilāf* merupakan masalah *ijtihād* sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum

¹⁷Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat* (Bandung: Mulia Press, 2008), h. 27.

¹⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 51.

Islam.¹⁹ Akan tetapi para ulama' dalam syarat wajib zakat hanya memberikan definisi secara global, yaitu antara lain, zakat adalah wajib atas orang merdeka yang muslim, *bāligh* dan berakal ketika ia memiliki harta dengan kepemilikan yang sempurna yang sudah sampai *nishāb*nya dan telah mencapai *haul*.

Imam Mālik adalah seorang tokoh yang dikenal para ulama' sebagai 'ālim besar dalam ilmu *hadīts*. Hal ini terlihat dari pernyataan para ulama', di antaranya Imam Syāfi'ī yang mengatakan, “*Apabila datang kepadamu hadīst dari Imam Mālik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu*”.²⁰ Imam Mālik dikenal adalah seseorang yang terkenal 'ālim besar, tetapi amat berhati-hati dan amat teliti dalam urusan hukum-hukum keagamaan, terutama dalam urusan riwayat yang dikatakan *hadīts* dari Rasulullah S.A.W. Beberapa ulama' meriwayatkan, Imam Mālik berkata: “*Saya tidak akan memberi fatwa-fatwa dan meriwayatkan hadīst, sehingga tujuh puluh ulama' membenarkan dan mengakui*”.²¹ Imam Mālik dalam menentukan hukum *fiqh*nya lebih banyak menggunakan *atsār* dibandingkan *ra'yi*.²² Adapun metode *istidlāl* Imam Mālik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada: *pertama, al-Qur'ān*, dalam memegang *al-Qur'ān* ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *dzāhir nash al-Qur'ān* atau keumumannya, meliputi *mafḥūm al-muhkālafah* dan *mafḥūm al-aulā* dengan memperhatikan *illah*nya. *Kedua, al-sunnah*, dalam berpegangan kepada *al-sunnah* sebagai dasar hukum, Imam Mālik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegangan kepada *al-Qur'ān*. Apabila dalil *syar'ī*

¹⁹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 114.

²⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 105.

²¹M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 199.

²²M. Imam Pamungkas, H. Maman Surahman, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015), h. 25.

menghendaki adanya *penta'wīlan*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wīl* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *dzhāhir al-Qur'ān* dengan makna yang terkandung dalam *al-Sunnah* sekalipun *syahir* (jelas) maka yang dipegang adalah makna *dzhāhir al-Qur'ān*. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh *al-sunnah* tersebut dikuatkan oleh *ijmā' ahl al-Madīnah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada *dzhāhir al-Qur'ān* (sunnah yang dimaksud di sini adalah *sunnah al-mutawātirah* atau *al-masyhūrah*). *Ketiga, Ijmā' ahl al-Madīnah. Keempat, fatwa sahabat. Kelima, Khabar āhād dan qiyās. Keenam, al-Istihāsān. Ketujuh, al-Maslahah al-Mursalah. Kedelapan, sad al-zarā'i. Kesembilan, istishāb. Kesepuluh, syar'u man qablanā syar'un lanā.*²³

Imam Syāfi'ī adalah seorang ulama' besar yang dilahirkan pada tahun 105 H di kota Gaza Palestina. Kemudian beliau menuntut ilmu di kota Makkah dengan gurunya yaitu, Imam Khālid bin Muslim seorang mufti Makkah, Fudhail bin 'Iyyād, Sufyān bin 'Uyaynah dan lain-lainya. Setelah itu beliau pergi ke kota Madinah pada saat berumur 12 tahun dan beliau menghafal kitab *al-Muwattha'* karya Imam Mālik selama sembilan hari dan beliau adalah murid terbaik Imam Mālik.²⁴ Imam Syāfi'ī ketika dewasanya telah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Pemahaman pemikiran bahasa yang tepat dan benar hingga pola pikir yang cerdas melekat sebagai ciri khasnya. Imam Syāfi'ī dapat memadukan antara *atsār* dan *ra'yi* menjadi satu pemahaman. Dalil-dalil yang difatwakannya didapat dengan metode *isthibhāt* di mana beliau sangat mengutamakan kebenaran di atas

²³Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc.Cit.*,

²⁴Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Taqrīrāt al-Sadīdah fī al-Masā'il al-Mufīdah* (Surabaya: Dār 'Ulūm al-Islāmiyyah, 2004), h. 31.

segalanya. Tingkatan ini disebut sebagai tingkatan *mujtahid mutlaq*.²⁵ Adapun Imam Syāfi'ī dalam pola pemikirannya serta metode *istidlāl*nya menjadikan *al-Qur'ān* landasan yang paling pertama, dan landasan selanjutnya *al-Sunnah*, *ijmā'* dan *qiyās*. Hal ini ditegaskan oleh beliau dalam kitabnya *al-Risālāh*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَلَّ أَوْ حَرَّمَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَ
جِهَةِ الْعِلْمِ الْخَبْرُ فِي: الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ²⁶

“... Berkata Imam Syāfi'ī: tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah *al-kitāb* (*al-Qur'an*), *al-Sunnah*, *ijmā'* dan *qiyās*...”

Perbedaan pendapat kewajiban zakat bagi harta piutang ini disebabkan karena perbedaan pendapat tentang ketentuan kepemilikan penuh (*milk at-tām*) dan harta yang berkembang (*māl al-nām*) sebagai syarat wajib zakat. Dengan demikian Imam Mālik berpendapat tidak wajib membayar zakat bagi harta piutang. Hal ini beliau tegaskan dalam kitabnya *Al-muwattha'*:

قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ لَا
اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدِّينِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا
يُزَكِّيهِ حَتَّى
يَقْبِضَهُ.²⁷

“... Berkata Mālik: Permasalahan yang tidak ada perbedaan dalam mazhab kami terhadap piutang bahwa pemiliknya tidak menzakatinya sampai ia menerima piutangnya...”

Berseberangan dengan pendapat Imam Mālik, Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa wajib membayar zakat bagi harta yang piutang. Hal inipun beliau tegaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

²⁵M. Imam Pamungkas, H. Maman Surahman, *Op.Cit.*, h. 29.

²⁶Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Risālāh* (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), h. 13.

²⁷Al-Imam Mālik bin Anas, *Al-Muwattha'* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 160.

“... قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ لِرَجُلٍ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ كَمَا تَكُونُ
التِّجَارَةُ لَهُ غَائِبَةً وَالْوَدِيعَةُ وَفِي كُلِّ زَكَاةٍ...²⁸”

“...Imam Syāfi’ī berkata: apabila seseorang mempunyai piutang yang masih berada di tangan orang lain, maka hal ini sama seperti perniagaan dan wadi’ah (titipan) yang masih di tangan orang lain. Dan semuanya wajib dizakati...”

Berawal dari perbezaan pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī inilah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *isthinbāth* hukum kedua tokoh ulama’ tersebut sehingga terjadi perbezaan pendapat tentang zakat bagi harta piutang.

D. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persamaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī tentang zakat bagi harta piutang dengan dalil serta argumen mereka masing-masing ?
2. Bagaimana perbezaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang zakat bagi harta piutang dengan dalil serta argumen mereka masing-masing ?
3. Apa penyebab yang melatarbelakangi perbezaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī tentang zakat bagi harta piutang ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

²⁸Al-Imam Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm* (Al-Manshuroh: Dar al-Wafā’, 2001), h. 132.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi focus penelitian adalah sebagai berikut :

Bagaimana persamaan, perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang zakat harta piutang beserta dalil serta argument mereka masing-masing dan apa penyebab perbedaan pendapat antara keduanya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan wawasan pemikiran kepada masyarakat khususnya bagi umat Islam terkait pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang zakat harta piutang.
- b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Lampung.

F. Metode Penelitian.

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi.²⁹ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan di

²⁹Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), h. 1.

ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun laporan ilmiah.³⁰

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ulama' sebagai landasan teori-teori dari skripsi ini.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian *hukum normatif* atau penelitian *hukum doktriner* yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³¹ Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum Islam mengenai zakat bagi harta piutang. Maka dalam penelitian ini mencoba memahami perbedaan antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī mengenai zakat harta piutang. Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif-komparatif*, di mana penulis membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pandangan Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī mengenai zakat harta piutang, kemudian dibandingkan (komparasi) dan dianalisa berdasarkan data primer dan sekunder untuk mencari sebab yang melatarbelakangi pandangan di antara mereka.

³⁰Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95.

³¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 13.

3. Data dan Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi :

a. Bahan Primer

Dalam hal ini data primer yang diperoleh bersumber pada *al-Qur'ān* dan *al-hadīts*, kitab *al-Muwattha'* yang merupakan karangan Imam Mālik bin Ānas dan kitab *al-Umm* merupakan kitab monumental hasil karya Imam Syāfi'ī.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari kitab-kitab para yang dikarang oleh *Ashāb Mālikiyyah* dan *Syāfi'iyyah*, buku-buku *fiqh al-zakāh* dan *fiqh al-mu'āmalah*, jurnal dan pendapat lain yang ditulis oleh tokoh lain dari judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

G. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, artikel dan sumber bacaan lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan, dalam hal ini

penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

1. Pengolahan Data.

Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³²

2. Metode Analisis Data.

Dalam hal ini digunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor “...metode kualitatif adalah prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang yang dapat diamati...”³³

Sejalan dengan definisi tersebut Krik dan Muler mendefinisikan bahwa jenis penelitian kualitatif “...adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya...”³⁴

³²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 131.

³³Lexy J Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Resda Karya, 2001), h. 208.

³⁴*Ibid*, h. 300.

Jenis penelitian kualitatif dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak menggunakan angka-angka. Kesimpulan akhir menggunakan metode komparatif yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan pendapat antara Imam Mālik dengan Imam Syāfi'ī mengenai kewajiban zakat bagi harta piutang.

Dalam metode ini dibandingkan perbedaan antara Imam Mālik dengan Imam Syāfi'ī mengenai kewajiban zakat bagi harta piutang, dari metode ini diharapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab permasalahan di atas.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat.

1. Pengertian Zakat.

Zakat secara etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu: *zakkā yuzakkī* yang memiliki beberapa makna, antara lain:

- a. *Al-thathīr* (mensucikan)³⁵, sesuai dengan firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*” (Q.S. Al-Syams: 9).

- b. *Al-madh* (memuji)³⁶, sesuai dengan firman Allah SWT:

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقَى ﴿٣٢﴾

“*Janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa*” (Q.S. Al-Najm: 32).

- c. *Al-‘amal al-shālih* (perbuatan yang baik)³⁷, sesuai dengan firman Allah SWT:

فَارْدَنَا اَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكْوَةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

“*Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesholehannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya)*” (Q.S. Al-Kahfi: 81).

- d. *Al-ziyādah* (bertambah)³⁸, sebagaimana wasiat yang dikatakan oleh sahabat

‘Alī bin Abī Thālib kepada Kumail bin Ziyād al-Nakhāi:

³⁵ Ahmad Zainuddin al-Ma’barī, *Fath al-Mu’īn bi al-Syarh Qurratu al-‘Ain bi Muhimmāti al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004), h. 230.

³⁶ Sayyid al-Bakrī, *I’ānah al-Thālibīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 128.

³⁷ Wahbah al-Zuhālī, *Tafsīr al-Munīr Fī al-Aqīdah Wa al-Syarīah Wa al-Minhāj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009) Juz. VIII. h. 334.

³⁸ Muhyi al-Dīn bin Syarf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmu’ Syarh Muḥadzab li al-Syairāzī* (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1998), h. 295.

وَالْعِلْمُ يَزُكُّ عَلَى الْإِنْفَاقِ.³⁹

“Dan ilmu akan bertambah dengan cara diinfakkan”

Sedangkan zakat menurut termonologi, Ibn Qāsim Al-Ghazzī memberikan definisi sebagai berikut:

إِسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَيْرَ وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.⁴⁰

“Zakat adalah nama untuk harta tertentu, diambil dari harta tertentu, atas cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu”

Adapun al-Hāfidz Ibn Hajar al-Asqalāni memberikan definisi, yaitu:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ التَّصَابِ الْحَوْلِي إِلَى فَقِيرٍ وَ نَحْوِهِ غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَ مُطَّلَبِيٍّ⁴¹

“Zakat adalah memberikan sebagian harta dari nishāb yang dihitung setiap tahunnya, diberikan kepada orang miskin dan semisalnya selain keturunan hasyim dan mutthalib”

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (K.H.E.S), pada buku III bab I pasal 657 ayat I menjelaskan, yang dimaksud dengan: “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.⁴²

Dari ketiga definisi di atas, setidaknya ada tiga prinsip yang terkandung dalam istilah zakat:

- a. Zakat adalah hak yang telah ditentukan.

³⁹Alī ‘Asyūr, *5000 Hikmah Min Hikam al-Imām ‘Alī* (Beirut: Muassasah al-Tārikh al-‘Arabī, 2005), h. 613.

⁴⁰Al-Allamah Ibn Qasim al-Ghazzy, *Fath al-Qarib al-Mujib Fi Syarh Alfadz at-Taqrīb* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005), h. 119.

⁴¹Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Bi al-Syarh Shahīh al-Bukharī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), Juz IV, h. 5.

⁴²Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 159.

- b. Zakat dipungut pada sebagian harta tertentu, maksudnya pada jenis harta yang berkembang, seperti pungutan atas hasil bumi dan binatang ternak.
- c. Zakat diberikan untuk golongan/kelompok tertentu.
- d. Zakat dipungut setelah mencapai nilai *nishāb*.
- e. Zakat harta (*zakāh al-māl*) adalah pungutan tahunan (*haul*).⁴³

Berdasarkan ketiga prinsip di atas, maka dalam hal ini dapat diuraikan bahwa pungutan zakat diberlakukan atas beberapa harta kekayaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* bahwa harta yang wajib dizakati ada lima yaitu:

- a. *Al-Nuqūd* (emas dan perak).
- b. *Al-Mā'din Wa al-Rikāz* (barang tambang dan barang peninggalan kuno).
- c. *'Urūdh al-Tijārah* (harta perniagaan).
- d. *Al-Zurū' Wa al-Tsimār* (tanaman dan buah-buahan).
- e. *Al-An'ām* (hewan ternak).⁴⁴

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang meliputi harta dalam bentuk tertentu dan kriteria tertentu, yang wajib dikeluarkan oleh *muzakī*, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) ketika sudah mencapai *haul* dan mencapai *nishāb*, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan menghilangkan sifat tamak dan kikir dari diri *muzakī*.

⁴³Abdul Hāmid al-Ba'lī, *Iqthishādiyat al-Zakāh Wa 'Itibāru al-Siyāsah al-Māliyyah Wa al-Naqdiyyah*, diterjemhkan Muhammad Abqary Abdullah Karim (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 4.

⁴⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 758.

2. Dasar Hukum Zakat.

Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan ‘*ibadāh māliyah al-ijtimā’iyyah*’ yaitu ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habl min Allah* (hubungan secara vertikal) dan dimensi *habl min al-nās* (hubungan secara horizontal), maka seharusnya zakat memiliki dasar hukum hukum yang kuat yang bersumber dari *al-Qur’ān* atau *al-Hadīst* karena suatu ibadah hanya dapat dan boleh dilaksanakan apabila terdapat dalil atau dasar hukum yang menjelaskannya. Hal ini sesuai dengan *qāidah al-fiqhiyyah* yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ وَالْحُظْرُ إِلَّا مَا جَاءَ بِهِ الشَّارِعُ⁴⁵

“Asal sesuatu dalam perkara ibadah adalah dicegah dan dilarang sampai adanya dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya”

Mengenai dasar hukum zakat ini, sering didapati dalam *al-Qur’ān* dan *al-Hadīst* dengan beberapa redaksi yang berbeda namun mengandung makna yang sama, yaitu antara lain:

a. *Zakāh*⁴⁶, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ... ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’” (Q.S. Al-Baqarah: 43).

b. *Shadaqah*⁴⁷, sebagaimana firman Allah SWT:

⁴⁵Muhammad Bin Husain al-Jīzānī, *Dirāsah Wa Tahqīq Qāidah al-Ashl Fi al-‘Ibādah al-Man’u* (Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauziy, 1421 H), h. 43.

⁴⁶Mu’inan Rafi’, *Op.Cit.*, h. 27.

⁴⁷Ibn Hajar al-Asqalāni, *Op.Cit.*, h. 5.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ۗ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Taubah: 104).

Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa makna dari kalimat di atas adalah kewajiban mengambil atau memungut harta dari orang-orang yang kaya, makna ini merupakan pendapat para mayoritas *fuqahā'* dan ini merupakan pendapat yang benar.⁴⁸

c. *Haq*⁴⁹, sebagaimana firman Allah SWT:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿١٤١﴾

“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)” (Q.S. Al-An'am: 141).

Makna dari ayat di atas adalah bahwa Allah S.W.T memerintahkan untuk menunaikan kewajiban zakat ketika hari panen raya, yaitu waktu untuk memetik hasil panen setelah matang.⁵⁰ Dan sebagian *mufassir* berpendapat, maksud dari ayat ini adalah himbuan agar bertekad untuk mengeluarkan zakat, menjadikan tujuan serta memperhatikannya ketika hari panen sehingga tidak menunda-nunda mengeluarkan zakat pada awal waktu yang memungkinkan untuk menunaikannya.⁵¹

⁴⁸Wahbah al-Zuhailī, *Op.Cit.*, h. 29.

⁴⁹Ibn Hajar al-Asqalānī, *Loc.Cit.*,

⁵⁰Wahbah al-Zuhailī, *Op.Cit.*, h. 421.

⁵¹*Ibid*, h. 422.

d. *Nafaqah*⁵², sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ



“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S. Al-Taubah: 34)

e. *Afwu*⁵³, sebagaimana firman Allah SWT:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Q.S. Al-A’raf: 199).

Imam al-Qhurthubī mengatakan dalam kitab tafsirnya *al-Jāmi’ li al-Ahkām al-Qur’ān*

bahwa sebagian mufassir mengartikan kalimat tersebut dengan zakat, karena zakat merupakan sesuatu yang sedikit dari yang banyak.⁵⁴

Dalam *hadīts* Rasulullah S.A.W pun dijelaskan tentang kewajiban zakat, antara lain *hadīts* yang diriwayatkan dari sahabat dari Ibnu Abbas:

حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :

يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِفَافِ.⁵⁵

“Telah berkata kepadaku Abū Sufyān R.A menyebutkan *hadīts* Nabi S.A.W, maka Nabi yang memerintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi dan menjaga diri (*iffah*).

Dalam *hadīts* lain yang berbunyi:

⁵²Ibn Hajar al-Asqalāni, *Loc.Cit.*,

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴Al-Qhurthubi, *Al-Jāmi’ li al-Ahkām al-Qur’ān* (Riyadh: Dar Ālim al-Kutub, 2003). Juz VII, h. 346.

⁵⁵Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, *Op.Cit.*, h. 338.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁵⁶

“Dari ‘Abdullah bin ‘Abbās R.A berkata: bahwasanya Rasulullah S.A.W mengutus Mu‘adz ke kota Yaman dan Beliau berkata: ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya dan akan diberikan kepada mereka yang fakir” (H.R Bukhārī).

Berdasarkan ayat-ayat dan *hadīts* di atas yang menjelaskan secara tegas, bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam yang apabila tidak dilaksanakan maka akan goyahlah agamanya. Tidak hanya itu kehidupan bersosial dan bermasyarakat pun akan mulai merenggang karena tidak adanya rasa peduli antara sesama untuk berbagi, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa zakat adalah suatu ibadah *māliyah al-ijtimāiyyah* yang apabila seseorang menunaikannya akan mendapatkan dua keutamaan, yaitu keutamaan beribadah dengan menjalankan perintah Allah S.W.T dan keutamaan berbagi kepada sesama, hal ini sesuai dengan *qāidah fihiyyah*:

مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا.⁵⁷

⁵⁶Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Loc. Cit.*,

⁵⁷Abdurrahman al-Suyūthī, *Al-Asybah Wa al-Nadzhāir* (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), h. 184.

“Sesuatu yang lebih banyak perkerjaannya maka lebih banyak pula keutamaannya”.

3. Syarat-syarat Wajib dan Sah Zakat.

Zakat pada harta tidak wajib dan sah dikeluarkan kecuali bila telah memenuhi beberapa syarat. Di antara hikmah Allah S.W.T dalam mewajibkan syariat-syariatnya adalah dengan menjadikan syariat tersebut tidak wajib kecuali dengan keberadaannya, hal itu agar syariat berjalan dengan tertib. Apabila segala sesuatu tidak ada syaratnya, tentu memiliki kemungkinan wajib dan tidak wajib.⁵⁸

Adapun syarat-syarat wajib zakat terbagi menjadi dua, yaitu: syarat sah dan syarat wajib. Syarat sahnya membayar zakat adalah:

a. Niat.

Para ulama' telah sepakat bahwa salah satu syarat sah membayar zakat adalah niat, karena niat inilah yang membedakan penunaian dari kafarat, *diyah* dan *shadaqah-shadaqah* lainnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يُنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁵⁹

“Dari ‘Umar bin Khatāb R.A berkata: Aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan” (H.R. Bukhārī).

b. Memberikan Kepemilikan.

⁵⁸Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Op.Cit.*, h. 156.

⁵⁹Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Op.Cit.*, h. 7.

Memberikan kepemilikan kepada orang yang berhak menerimanya merupakan syarat sah untuk berzakat. Dasar hukum syarat sah ini yaitu firman Allah S.W.T. yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” (Q.S. Al-Nūr: 56).

Kalimat *ātū al-Zakāh* pada ayat di atas mengandung arti memerikan kepemilikan yang sempurna. Hikmah di balik itu agar orang yang berhak menerima bisa mengelola atau mentransaksikan harta yang ia peroleh untuk kebutuhannya. Maka tidak sah apabila *muzakkī* hanya mengizinkan atau memperbolehkan untuk mengambil manfaat dari yang ia keluarkan, seperti memperbolehkannya untuk memakan makanan sesukanya yang tersedia di suatu acara atau meminjamkannya untuk beberapa waktu yang ditentukan. Karena harta zakat diberikan haruslah berdasarkan *tabarru'* (sosial) tanpa mengharapkan imbalan seperti *muzakkī* yang memberikan zakatnya kepada *mustahiq* dengan memintanya untuk melakukan suatu pekerjaan, walaupun upah yang ia berikan lebih besar dari harta zakat yang ia berikan. Maka hal yang seperti tidak diperbolehkan dan mencegah keabsahan zakat yang ia keluarkan.⁶⁰

Setelah mengetahui syarat-syarat sah, selanjutnya akan diuraikan syarat-syarat wajib zakat, yang uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Islam (*al-Islām*).

Para ulama' telah sepakat, bahwasannya seseorang muslim apabila memiliki sejumlah harta yang telah mencapai *nishāb*, maka wajiblah baginya untuk

⁶⁰Wahbah al-Zuhāī, *Op.Cit.*, h. 752.

mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan perkataan sahabat Abu Bakar Al-Shiddiq:

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

“Ini adalah suatu sedekah yang wajib yang diwajibkan Rasulullah S.A.W atas orang-orang muslim”

Hal ini disebabkan karena zakat bukanlah beban dan tidak dibebankan bagi orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbī*) atau yang tidak memusuhi Islam (*dzimmī*) dan tidak terkena kewajiban tersebut selama masa kafirnya.⁶²

Selanjutnya, Syekh Ibrāhīm al-Baijurī menjelaskan terhadap status seorang kafir asli dan murtad dalam perihal kewajiban zakat. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi seorang kafir asli (yang belum pernah sekalipun memeluk agama Islam), namun apabila seseorang tersebut memeluk agama Islam, maka tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya seperti shalat dan puasa.⁶³ Berbeda dengan seseorang yang murtad (pernah memeluk Islam sebelumnya) maka kewajiban zakatnya masih dibebankan atasnya, akan tetapi ia harus mengeluarkan zakatnya ketika kembali memeluk Islam.⁶⁴

b. Merdeka (*al-Hurriyyah*).

Ulama’ telah sepakat, bahwasannya kemerdekaan (*al-hurriyyah*) merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat.⁶⁵ Para ulama’ pun sepakat bahwa tidak diwajibkan zakat bagi hamba sahaya dikarenakan ia tidak

⁶¹ Ibrāhīm al-Baijurī, *Hāsyiyah al-Syekh Ibrāhīm al-Bayjurī* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2007) Juz I, h. 500.

⁶² Yūsuf al-Qardhāwī, *Op. Cit.*, h. 96.

⁶³ Ibrāhīm al-Bayjurī, *Loc. Cit.*,

⁶⁴ *Ibid*, h. 501.

⁶⁵ Mu’inan Rafī, *Op. Cit.*, h. 377.

memiliki hak kepemilikan, akan tetapi kewajiban zakat dibebankan atas pemilik/tuannya.⁶⁶ Bagi hamba sahaya *muba'adh* (hamba sahaya yang sebagian dirinya berstatus merdeka dan sebagiannya berstatus hamba sahaya) maka diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat dikarenakan ia bisa memiliki hak milik.⁶⁷ Dan bagi hamba sahaya *mukatab* (hamba sahaya yang kemerdekaannya dikaitkan/disyaratkan oleh sifat atau lainnya) maka tidak diwajibkan baginya dan bagi pemilik/tuannya mengeluarkan zakat.⁶⁸

c. Kepemilikan Sempurna (*Milk al-Tām*).

Dalam Islam, hak milik pribadi tidaklah mutlak, sebab pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah yang diamanatkan kepada pemiliknya, karena itu harta hanyalah berfungsi sosial. Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang ada di tangan manusia adalah Allah S.W.T. Sedang manusia hanya tidak lebih dari sekedar penerima amanah darinya.⁶⁹ Sebagaimana firman Allah S.W.T yang berbunyi:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

“Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Dan semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah” (Q.S. Tāhā: 6).

Dalam pembahasan zakat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa harta kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan kekuasaannya, dan tidak ada sangkutan didalamnya dengan harta orang lain, pemiliknya bisa

⁶⁶Wahbah al-Zuhaylī, *Op.Cit.*, h. 738.

⁶⁷Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Op.Cit.*, h. 397.

⁶⁸Ibrāhīm al-Bayjurī, *Loc.Cit.*,

⁶⁹Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, *Al-‘Adalah*, Vol XIII, No. 2, 2016, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2016, (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>. (3 Juni 2018), h. 240.

mentransaksikannya serta mengelolanya sesuai dengan keinginannya sendiri dan ia bisa mengambil manfaat dari hartanya tersebut.⁷⁰ Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat tentang kriteria dari kepemilikan sempurna ini, menurut para ulama' *Hanāfiyyah*, yang dimaksud kepemilikan sempurna adalah harta tersebut hendaklah pada genggamannya atau penguasaannya oleh pemiliknya yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, apabila seseorang memiliki sesuatu yang tidak ada pada genggamannya atau penguasaannya, maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat. Para ulama' berbeda pendapat tentang kriteria dari kepemilikan sempurna ini, para ulama' *Mālikiyyah* berpendapat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah seseorang tersebut adalah pemilik dari yang mentransaksikan harta yang ia miliki, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat bagi hamba sahaya dengan segala bentuk-bentuknya.⁷¹ Para ulama' *Syāfi'iyyah* berpendapat, yang dimaksud kepemilikan sempurna adalah selain hamba sahaya dan hamba sahaya *mukātab*, maka tidak diwajibkan atas mereka mengeluarkan zakat, hal ini dikarenakan status hamba sahaya tidak dapat memiliki harta dan status *mukātab* kepemilikannya itu lemah. Hal ini pun sama dengan status harta yang mubah, seperti tumbuhan yang tumbuh di suatu tanah tanpa ada yang menanamnya. Dan ulama' *Hanābilah* berpendapat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna itu adalah harta seseorang yang dimiliki secara utuh dan tidak ada sangkutan dengan hak orang lain, dapat ditransaksikan sesuai dengan keinginan sendiri dan dapat dimanfaatkan oleh dirinya sendiri bukan orang lain.

d. Nishāb.

⁷⁰Yūsuf al-Qardhāwī, *Op.Cit.*, h. 130.

⁷¹Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ala al-Madzāhib al-Arba'ah* (Kairo: Dār al-Hadīts, 2004), h. 458. et.seq

Nishāb adalah ukuran atau batas minimal harta yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat.⁷²

e. Mencapai Satu Tahun (*Haul*).

Syarat selanjutnya adalah *haul*, harta seseorang yang telah mencapai satu tahun, maka diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat. Maksudnya adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya dua belas bulan dengan hitungan bulan *qomariyyah* (hijriyah) bukan *syamsiyyah* (milādiyyah). Akan tetapi tidak semua harta yang memiliki syarat *haul*, ada beberapa harta yang tidak memiliki syarat tersebut yang akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang.⁷³ Dasar hukum dari syarat ini adalah sabda Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh al-Imam ‘Alī bin Abī Thālib R.A yang berbunyi:

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).⁷⁴

“...Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu sampai satu tahun” (H.R Abū Daud).

Para ulama’ berbeda pendapat dalam kriteria harta yang mencapai *haul*, menurut Abū Hanīfah dan Imam Syāfi’i mengatakan, harta yang rusak atau sengaja dirusak dapat mempengaruhi perhitungan *haul*. Sedangkan Imam Mālik dan Imam Ahmad berpendapat, apabila seseorang sengaja merusak hartanya agar bebas dari tuntutan zakat, ia tetap wajib mengeluarkan zakat bila telah mencapai *haul* dan *nishābnya*.⁷⁵

⁷²Sulaimān bin Muhammad al-Bujayromī, *Tukhfah al-Habīb ‘alā Syarh al-Khatīb* (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1996, Juz III, h. 10.

⁷³Wahbah al-Zuhailī, *Op.Cit.*, h. 744.

⁷⁴Sulaimān bin al-Asy’ats al-Sajistānī, *Al-Sunan*, Juz III (Beirut: Dār al-Ta’shīl, 2015) h. 413.

⁷⁵Mu’inan Rafī’, *Op.Cit.*, h. 40.

Syarat *haul* ini juga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama' tentang hukum *ta'jil al-zakāh* (mendahulukan zakat sebelum *haul*), dalam hal ini ada dua pendapat tentang hukum *ta'jil al-zakāh*.⁷⁶ Pendapat pertama, yaitu pendapat mayoritas *fuqahā'* mengatakan bahwa boleh mendahulukan zakat sebelum *haul* apabila hartanya telah mencapai *nishāb*. Hal ini berdasarkan *hadīth*s yang diriwayatkan dari Imam 'Alī bin Abī Thālib, bahwa Abbās bin Abdul Muthallib meminta kepada Rasulullah S.A.W untuk mendahulukan zakat sebelum *haul*, maka Rasulullah S.A.W pun memperbolehkannya.⁷⁷

Dan Imam Syāfi'ī mensyaratkan atas kebolehan *ta'jil al-zakāh* dengan dua syarat, yaitu:

1. Hendaklah pemilik harta (*muzakkī*) tersebut adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat sampai akhir *haul*.
2. Hendaklah orang yang menerima zakat (*mustahiq*) adalah orang yang berhak menerima sampai akhir *haul*.⁷⁸

Maksudnya adalah, apabila salah satu dari *muzakkī* dan *mustahiq* meninggal dunia sebelum masuknya *haul*, atau salah satu di antara mereka murtad, atau *mustahiq* menjadi orang yang berkecukupan dari hartanya yang lain, atau tiba-tiba harta *muzakkī* tersebut kurang dari *nishāb* sebelum sampai *haul*, maka tidak diperbolehkan *ta'jil al-zakāh* sebelum masuknya *haul*.

Imam Mālik dan *Zhāhiriyyah* berpendapat, tidak diperbolehkan *ta'jil al-zakāh* sebelum masuknya *haul*, dikarenakan zakat menyerupai salat dan salat tidak

⁷⁶Wahbah al-Zuhailī, *Op.Cit.*, h. 756.

⁷⁷Muhammad bin 'Alī al-Syaukānī, *Nail al-Authār Syarh Muntaqa al-Akhhbār* (Lebanon: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2004), h. 771.

⁷⁸Wahbah al-Zuhailī, *Op.Cit.*, h. 756.

boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya. Hal ini dikarenakan *haul* adalah satu syarat wajib zakat seperti *nishāb*, maka tidak diperbolehkan mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum terpenuhinya syarat wajib.

4. Harta Yang Wajib Dizakatkan.

Wahbah al-Zuhailī seorang ulama kontemporer menyatakan dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, bahwa harta yang wajib dizakati ada lima macam jenis harta yaitu: *al-nuqūd* (emas dan perak), *al-mā'din wa al-rikāz* (barang tambang dan barang peninggalan kuno), *urūdh al-tijārah* (harta perniagaan), *al-zurū' wa al-tsimār* (tanaman dan buah-buahan) dan *al-an'ām* (hewan ternak).⁷⁹

Keseluruhan macam harta ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Zakat Emas dan Perak (*al-Dzahab Wa al-Fidhah*).

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak yaitu firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S. Al-Taubah: 34).

Para ulama' sepakat mengenai kewajiban zakat emas dan perak. Termasuk katagori emas dan perak adalah sesuatu yang senilai dengannya, seperti, mata uang yang berlaku pada suatu Negara pada saat ini. Oleh sebab itu sebagian para ulama' ada yang mewajibkan zakat atas saham, jaminan dan seluruh kertas-kertas berharga seperti: cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain. Akan tetapi, untuk zakat ini,

⁷⁹*Ibid*, h. 758.

ada beberapa syarat wajib yang harus terpenuhi, apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Emas dan perak tersebut hendaklah bukan perhiasaan yang *mubāh*. Arti dari kata *mubāh* itu adalah emas dan perak tersebut bukan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti seseorang wanita yang menggunakan gelang, cincin, kalung dan anting yang terbuat dari emas atau perak, maka pada gambaran ini, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
2. *Mudhi al-haul* (mencapai satu tahun), maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat bagi emas dan perak yang tidak mencapai satu tahun.
3. *Bulūgh al-nishāb* (mencapai *nishāb*), maka tidak diwajibkan zakat bagi emas dan perak yang tidak mencapai *nishāb*.⁸⁰

Adapun *nishāb* dari emas adalah 20 *dīnar* = 20 *mistqāl* atau setara dengan 28 gram emas, sedangkan *nishāb* perak adalah 5 *ūqiyyah* = 200 *dirham* atau setara dengan 595 gram. Dan kadar yang wajib dikeluarkan adalah *rubu' al-usyr* (2,5%).⁸¹

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W:

عَنْ عِيَ b بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ (يَعْنِي فِي الذَّهَبِ) حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ إِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا (وَ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ) فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).⁸²

⁸⁰Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Op.Cit.*, 410.

⁸¹Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Op.Cit.*, h. 167.

⁸²Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sajistānī, *Op.Cit.*, h. 413.

“Dan tidak diwajibkan atas kamu (yang dimaksud adalah harta emas) sampai kamu memiliki 20 dinar, apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah mencapai haul maka diwajibkan atas kamu zakatnya setengah dinar. (R.H Abu Daud).

Sebagai contoh untuk memperjelas: apabila seseorang memiliki 500 gr emas, berapakah zakat yang harus dikeluarkan jika emas tersebut telah melewati masa satu haul? Maka dikatakan: karena emas yang dimiliki telah melebihi *nishāb* (85 gr), maka yang wajib dikeluarkan adalah *rubu' al-'usyr* (1/40), sehingga nilai yang wajib dikeluarkan adalah: $500 \text{ gr} \times 1/40 = 12,5 \text{ gr}$.

b. Zakat Barang Tambang dan Barang Peninggalan Kuno (*al-Mā'din Wa al-Rikāz*).

Al-mā'din secara bahasa diambil dari kata *ya'danu-'adnan* yang memiliki arti tinggal (menetap) atau *ma'dan* yang artinya titik segala sesuatu.⁸³ Sedangkan secara syara' adalah semua yang keluar dari bumi yang dijadikan bahan untuk menciptakan barang lain yang memiliki harga.⁸⁴ Dan pengertian *al-rikāz* secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab *rakaza-yarkazu* yang memiliki arti tersembunyi.⁸⁵ Sedangkan secara *syara'* adalah harta *jāhiliyyah* (yaitu keadaan orang Arab sebelum masuknya Islam) yang terpendam,⁸⁶ yang diambil tanpa harus mengeluarkan biaya dan banyak bekerja, baik harta itu berupa emas, perak dan lain-lain.⁸⁷

Landasan hukum atas kewajiban zakat ini adalah sabda Rasulullah S.A.W:

⁸³Sayyid Sābiq, *Op.Cit.*, h. 266.

⁸⁴Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Op.Cit.*, h. 235.

⁸⁵Sayyid Sābiq, *Loc.Cit.*,

⁸⁶Ibrāhīm al-Bayjurī, *Op.Cit.*, h. 532.

⁸⁷Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Loc.Cit.*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَجَمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ وَالْبَيْتُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).⁸⁸
“Dari Abu Hurairah R.A, bahwasannya Rasulullah S.A.W berkata: Melukai binatang itu tidaklah dapat dituntutkan belanya, begitupun mengali sumur dan barang tambang dan mengenai rikaz, zakatnya ialah 1/5” (H.R. Muslim).

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya itu. Ulama’ *Hanabilah* berpendapat bahwa seluruh hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya dari barang lainya, seperti: emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, batu bara dan lain-lainnya. Ulama’ *Hanāfiyyah* berpendapat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api seperti emas dan perak, adapun yang tidak dapat dicetak, maka tidaklah wajib zakat seperti permata. Sedangkan ulama’ *Syāfi’iyyah* dan *Mālikiyyah* berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanya pada emas dan perak saja.⁸⁹

Selanjutnya, mengenai zakat harta karun (peninggalan kuno) ada beberapa syarat wajib antara lain yaitu:

1. Hendaklah barang tersebut merupakan harta *jāhiliyyah* yang terpendam, hal ini dapat diketahui dengan nama pemilik atau tanda-tanda lain yang dapat menunjukkan kebenarannya.
2. Mencapai *Nishāb* (*Bulūgh al-Nishāb*).
3. Hendaklah barang tersebut ditemukan di tanah yang mati (tidak diketahui pemiliknya).⁹⁰

⁸⁸Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahīh Muslim*, Juz III, No. 1710 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turats al-‘Arabī, 2010), h. 1334.

⁸⁹Sayyid Sābiq, *Loc. Cit.*,

⁹⁰Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Op. Cit.*, h. 413.

Menurut *jumhūr ulama'* berpendapat bahwa kadar *nishāb*nya adalah seperti *nishāb* emas yaitu adalah 20 *dīnar* = 20 *mistqāl* atau setara dengan 28 gram emas, atau *nishāb* perak adalah 5 *ūqiyyah* = 200 *dirhām* atau setara dengan 595 gram. Dan kadar wajib yang harus dikeluarkan pada harta barang tambang adalah 1/40. Sedangkan kadar wajib atas barang temuan adalah 1/5.⁹¹

c. Zakat Harta Perniagaan (*'Urūdh al-Tijārah*).

Al-urūdh dalam bahasa Arab adalah kalimat plural dari kata *aradh* yang memiliki arti *hithām al-dunya* (harta duniawi).⁹² Dalam kata lain adalah selain emas dan perak.⁹³ Yaitu, barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan lain-lainnya yang disiapkan untuk diperniagakan.⁹⁴ Sedangkan *al-tijārah* adalah memutarakan harta dengan tujuan mencari keuntungan.⁹⁵

Dasar hukum kewajiban zakat ini yaitu firman Allah S.W.T yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

⁹¹Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Op.Cit.*, h. 242.

⁹²Wahbah al-Zuhailī, *Op.Cit.*, h. 787.

⁹³Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Op.Cit.*, h. 414.

⁹⁴Wahbah al-Zuhailī, *Loc.Cit.*,

⁹⁵Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Loc.Cit.*,

Imam Thabari mengatakan dalam kitabnya *tafsīr al-Thabarī* bahwa arti dari kalimat “*nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu*” adalah keluarkanlah zakat dan bersedekahlah dari apa yang telah kamu transaksikan dari perniagaan yang halal.⁹⁶

Syarat-syarat wajib zakat bagi harta perniagaan ada enam, yaitu:

1. Hendaklah barang yang akan diperniagakan dalam berbentuk barang bukan berbentuk emas dan perak. Apabila barang yang akan diperniagakan berbentuk emas dan perak, maka diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat emas dan perak bukan zakat harta perniagaan.
2. Hendaklah pemilik barang tersebut berniat agar barang tersebut untuk diperdagangkan, maka tidak diwajibkan atasnya zakat apabila barang tersebut hanya untuk disimpan.
3. Hendaklah pemilik barang meniatkan barang itu untuk berdagang pada saat transaksi, dan pada saat itulah *haul* dimulai. Namun, apabila seseorang membeli barang dengan tujuan untuk disimpan, kemudian setelah beberapa waktu ia berniat untuk berdagang, maka pada saat itulah *haul* dimulai.
4. Hendaklah kepemilikan barang tersebut dengan cara *muā'wadhah* (transaksi), maka tidak diwajibkan bagi harta yang dihasilkan dari waris, hibah, wasiat dan lainnya, sampai pemiliknya mengelola harta tersebut untuk maksud berniaga.

⁹⁶ Al-Thabarī, *Tafsīr al-Thabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz II (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994), h. 159.

5. Hendaklah pemilik barang tidak merubah/ mengalihkan barang-barang dagangannya menjadi uang. Apabila semua barang dagangannya uang, sementara ia kurang dari *nishāb* maka *haulnya* terputus.
6. Hendaklah pemilik harta tidak berniat/ bertujuan untuk memiliki (hanya untuk dimanfaatkan) di tengah-tengah masa *haul*. Apabila ia berniat seperti ini, maka terputuslah *haulnya*.⁹⁷

Kadar *nishāb* zakat perniagaan ini adalah seperti *nishāb* emas yaitu adalah 20 *dīnar* = 20 *mistqāl* atau setara dengan 28 gram emas, atau *nishāb* perak adalah 5 *ūqiyyah* = 200 *dirham* atau setara dengan 595 gram. Dan kadar yang wajib dikeluarkan adalah *rubu' al-usyr* (2,5%).⁹⁸

d. Zakat Tanaman dan Buah-buahan (*al-Zurū' wa al-Tsimār*).

Al-zurū' (tanaman) adalah setiap yaitu yang dijadikan makanan pokok yang dikonsumsi pada waktu *ikhtiyār* (kebiasaan), seperti gandum, sagu, beras dan lainnya. Sedangkan *al-tsimār* (buah-buahan) hanya diwajibkan pada kurma dan anggur.⁹⁹

Secara umum dalil yang mewajibkan zakat pada kedua harta ini adalah firman Allah S.W.T yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

⁹⁷Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Loc.Cit.*,

⁹⁸Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Op.Cit.*, 234.

⁹⁹Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Op.Cit.*, h. 405.

Untuk secara rinci hal ini dijelaskan dalam hadīts yang diriwayatkan dari Abū Burdah yang dia terima dari Abū Mūsa dan Mu'ādz R.A:

عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ : الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسَّمْرُ وَالرَّيْبُ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).¹⁰⁰

“Dari Abū Mūsā dan Mu'ādz bin Jabal R.A, bahwasannya Rasulullah SAW mengutus mereka berdua ke Yaman untuk mengajari manusia tentang agama. Maka mereka diperintahkan agar tidak memungut zakat kecuali pada empat macam ini: gandum, padi, kurma dan anggur” (H.R. Al-Baihaqī).

Para ulama' telah bersepakat bahwa *nishāb* pada biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 *wasāq*¹⁰¹, sedangkan 1 *wasāq* adalah 60 *shā'* dan jika dijumlahkan maka 5 *wasāq* adalah 300 *shā'*.¹⁰² Jadi *nishāb* zakat pada zakat biji-bijian dan buah adalah 825 kg.¹⁰³ Adapun kadar jumlah yang wajib dikeluarkan itu berbeda-beda, terkadang '*usyr* (1/10) dan terkadang *nisf al-usyr* (1/20). Hal ini tergantung kepada bagaimana cara tumbuhan itu diairi atau disiram. Apabila biji-bijian atau buah-buahan disiram tanpa mengeluarkan biaya seperti tadah hujan atau menggunakan irigasi yang tidak menegeluarkan biaya maka kadar yang wajib dikeluarkan adalah '*usyr* (1/10). Namun, apabila dalam proses penanaman mengeluarkan biaya, maka yang wajib dikeluarkan adalah *nisf al-usyr* (1/20).¹⁰⁴ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W yang berbunyi:

¹⁰⁰ Ahmad bin Husain al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz IV (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 210.

¹⁰¹ Yūsūf al-Qardhāwī, *Op.Cit.*, h. 361.

¹⁰² Yūsūf al-Qardhāwī, *Ibid*, h. 364.

¹⁰³ Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Op.Cit.*, h. 405.

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Op.Cit.*, h. 329.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَلْ عُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا أَلْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالتَّضْجِ نِصْفُ أَلْعُشْرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹⁰⁵

“Diriwayatkan dari Sālim dari ayahnya R.A, bahwasannya Nabi S.A.W berkata: Tanaman yang diari oleh hujan, mata air atau air yang datang sendiri maka zakatnya 1/10 dan yang diari dengan alat penyiraman maka zakatnya 1/2” (H.R. Bukhārī).

e. Zakat Hewan Ternak (*Zakāh al-An’ām*).

Dalam *al-Qur’ān* Allah S.W.T menyatakan secara jelas bahwa ada beberapa hewan ternak yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya, antara lain hewan yang disebut dengan *an’ām*, dinamakan dengan nama tersebut karena di dalam hewan tersebut banyak nikmat-nikmat Allah S.W.T yang dititipkan untuk kebutuhan manusia.¹⁰⁶ Hal ini tercantum dalam firman Allah S.W.T antara lain:

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

“5. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. 6. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. 7. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Nahl: 5-7).

Sesuai ayat di atas bahwa arti dari kata *al-an’ām* adalah hewan ternak. Dan hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi termasuk kerbau dan kambing.

Ada empat syarat wajib bagi hewan tersebut untuk dikeluarkan zakat, yaitu:

¹⁰⁵Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Op.Cit.*, h. 362.

¹⁰⁶Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Op.Cit.*, h. 398.

1. *Bulūgh al-nishāb* (mencapai *nishāb*), maka tidak diwajibkan zakat bagi hewan yang tidak mencapai *nishāb*.
2. *Mudhi al-haul* (mencapai satu tahun), maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat bagi hewan yang tidak mencapai satu tahun. Dan yang menjadi ukuran satu tahun adalah tahun *hijriyyah* bukan *mīlādiyyah* (masehi).
3. Digembalakan dan mendapatkan makanan dari lapangan atau padang rumput yang terbuka (*kalā' mubāh*), maka tidak wajib dikeluarkannya zakat bagi hewan yang diperternakan atau mendapatkan pangan dari padang rumput yang tidak terbuka, seperti padang rumput yang dibawah kepemilikan seseorang.
4. Tidak diperkerjakan, maka tidak diwajibkan zakat bagi hewan yang diperkerjakan, seperti untuk mengangkut barang, transportasi dan membajak sawah.¹⁰⁷

Selanjutnya, mengenai *nishāb* ketiga hewan tersebut akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini:

1. Unta.

Tidak diwajibkan zakat pada unta, jika kurang dari lima ekor. Maka apabila sudah sampai lima ekor maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yaitu satu ekor kambing (*syāh*). Jika jumlah unta yang dimilikinya lebih dari itu maka bertambahlah juga hewan yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W yang berbunyi:

¹⁰⁷Hasan bin Ahmad al-Kāf, *Loc. Cit.*,

لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).¹⁰⁸

“Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi seseorang yang memiliki unta dibawah lima ekor begitupun empat ekor. Maka apabila telah sampai lima ekor maka diwajibkan untuk mengeluarkan syāh” (H.R. Ibn Mājah).

Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel di bawah ini:¹⁰⁹

Jumlah unta		Yang wajib dizakatkan
Dari	Sampai	
1	4	Tidak terkena zakat
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	1 ekor <i>bintu makhādh</i> (yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya satu tahun dan memasuki tahun kedua. Dinamakan demikian karena induknya sudah hamil lagi).
36	45	1 ekor <i>bintu labūn</i> (yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya satu tahun dan memasuki tahun kedua. Dinamakan demikian karena induknya telah melahirkan lagi dan memiliki susu).
46	60	1 ekor <i>hiqqah</i> (yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya satu tahun dan memasuki tahun kedua. Dinamakan hiqqah karena sudah dapat dibuahi oleh unta jantan).
61	75	1 ekor <i>jadz'ah</i> (yaitu unta betina yang telah sempurna umurnya empat tahun dan memasuki tahun kelima)
76	90	2 ekor <i>bintu labūn</i>

¹⁰⁸Muhammad bin Yazīd bin Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz I, No. 1799 (Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), h. 574.

¹⁰⁹Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Op.Cit.*, h. 190.

91	120	2 ekor <i>hiqqah</i>
----	-----	----------------------

Selanjutnya, unta yang lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor dan wajib zakatnya adalah 1 ekor *bintu labūn*, dan setiap 50 ekor maka wajib zakatnya adalah 1 ekor *hiqqah*.

2. Sapi.

Dasar hukum yang menjelaskan kewajiban zakat pada hewan sapi adalah sabda Rasulullah S.A.W:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاوِرَ (رَوَاهُ دَارُ الْقُطْنِيِّ).¹¹⁰

“Bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W mengutusnyanya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkannya agar mengambil seekor *tabī’* atau *tabī’ah* untuk setiap tiga puluh ekor sapi, seekor *musinnah* untuk setiap empat puluh ekor sapi, atau menggantinya dengan baju *ma’afiri*” (R.H Dār al-Qutnī).

Nishāb sapi adalah 30 ekor, apabila belum mencapai 30 ekor maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Untuk lebih jelasnya lihatlah table berikut ini:¹¹¹

Jumlah sapi		Yang wajib dizakatkan
Dari	Sampai	
1	29	Tidak terkena zakat
30	39	1 ekor <i>tabī’</i> (yaitu sapi yang berusia satu tahun)

¹¹⁰ Abū Hasan ‘Alī bin ‘Umar Dār al-Quthnī, *Sunan Dār al-Quthnī*, Juz II, No. 1935 (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2008), h. 490.

¹¹¹ Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Op.Cit.*, h. 195.

40	59	1 ekor <i>musinnah</i> (yaitu sapi yang berusia dua tahun)
60	69	2 ekor <i>tabī'</i>
70	79	1ekor <i>tabī'</i> dan 1 ekor <i>musinnah</i>
80	89	2 ekor <i>musinnah</i>
90	99	3 ekor <i>tabī'</i>
100	109	2 ekor <i>tabī'</i> dan 1 ekor <i>musinnah</i>

Selanjutnya, sapi yang lebih dari 60 ekor, maka setiap 30 ekor wajib zakatnya satu ekor *tabī'* dan setiap 40 ekor maka wajib zakatnya 1 ekor *musinnah*.

3. Kambing.

Dasar hukum yang menjelaskan kewajiban zakat pada hewan kambing adalah sabda Rasulullah S.A.W yang berbunyi:

وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةً شَاهٌ فَإِذَا زَادَتْ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاهٌ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ).¹¹²

“Untuk shadaqah kambing yang dilepas, apabila berjumlah empat puluh sampai seratus dua puluh kambing maka zakatnya adalah syāh (satu ekor kambing), apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus, maka zakatnya adalah dua ekor syāh (kambing), jika lebih dari dua ratus sampai tiga ratus, maka zakatnya adalah tiga ekor syāh (kambing). Jika lebih dari tiga ratus maka setiap seratus seekor syāh (kambing)”(H.R. Al-Dārimī)

Nishāb kambing adalah 40 ekor, apabila belum mencapai 40 ekor maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Untuk lebih jelasnya lihatlah table berikut ini:¹¹³

¹¹² Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Dārimī, *Musnad al-Dārimī*, Juz II, No. 1660 (Saudi: Dār al-Mughnī, 2008), h. 1009.

Jumlah kambing		Yang wajib dizakatkan
Dari	Sampai	
1	39	Tidak terkena zakat
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	399	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing

Selanjutnya, kambing yang lebih dari 400 ekor, maka setiap 100 ekor wajib zakatnya satu ekor kambing.

5. Golongan Penerima Zakat.

Penyaluran zakat hanya terbatas dan diperbolehkan pada delapan golongan.

Kedelapan golongan ini telah ditetapkan di dalam yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al-Taubah: 60).

Ayat di atas diawali dengan kalimat *ādatu al-hashr* yaitu *innamā* yang memiliki arti bahwa pendistribusian zakat tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk delapan *ashnāf* (golongan) yang telah disebutkan dalam ayat.¹¹⁴ Secara

¹¹³Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Op.Cit.*, h. 196.

¹¹⁴*Ibid.*, h. 249.

garis besar ulama' membagi delapan golongan tersebut menjadi dua katagori, yaitu:

1. Golongan yang disebutkan dalam menggunakan huruf *lām* yang memiliki arti kepemilikan, mereka adalah:
 - a. *Faqīr*.
 - b. *Miskīn*.
 - c. *Āmil*.
 - d. *Muallaf*.
2. Golongan yang disebutkan dalam menggunakan huruf *fī* yang memiliki arti *dharf* (tempat), mereka adalah:
 - a. *Riqāb*.
 - b. *Ghārim*.
 - c. *Sabīlillah*.
 - d. *Ibn al-Sabīl*.¹¹⁵

Berikut ini uraian tentang delapan *ashnāf* di atas, yang penguraiannya adalah sebagai berikut:

1 dan 2. *Fuqāra'* dan *masākīn*.

Kelompok penerima zakat yang pertama dan kedua adalah *fuqāra'* dan *masākīn*. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa *fuqāra'* dan *masākīn* termasuk dalam *shinfāni li nauī'n wāhidin* (katagori dua kata) yang artinya apabila kedua kata ini digabungkan maka masing-masing kata memiliki arti yang berbeda, namun apabila kata ini dipisah maka kedua kata ini memiliki arti yang sama. Hal

¹¹⁵Mu'inan Rafi', *Op.Cit.*, h. 49.

ini serupa dengan kata Islam dan Iman.¹¹⁶ Dalam ayat ini kata *fuqāra'* dan *masākīn* digabungkan, maka kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Adapun perbedaannya para *fuqahā* menjelaskan bahwa *fuqāra'* adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuannya. Dia juga tidak memiliki suami atau istri, orang tua dan anak yang mencukupi kebutuhannya dan memberinya nafkah, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya memiliki tiga. Sedangkan *masākīn* adalah orang yang mampu berkerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun dia hanya bisa mempunyai delapan.¹¹⁷

3. 'Āmil.

Kelompok penerima zakat yang ketiga adalah 'āmil. Untuk mengatur kelancaran pelaksanaan zakat, *al- Qur'ān* menetapkan salah satu *ashnāf* untuk mengatur zakat biasanya disebut dengan 'āmil zakat. Namun, seperti apa 'āmil zakat, bagaimana 'āmil zakat harus berkerja dan siapa saja yang dapat menjadi 'āmil zakat, tidak diatur di dalam *al- Qur'ān* secara detail.¹¹⁸ Oleh karena itu para ulama' memberikan pengertian 'āmil zakat, menurut Syekh Ibrāhīm al-Baijurī 'āmil zakat adalah:

مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَىٰ آخِذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفَعَهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا¹¹⁹

¹¹⁶Yūsuf al- Qardhāwī, *Op.Cit.*, h. 544.

¹¹⁷Wahbah al-Zuhailī, *Op.Cit.*, h. 869

¹¹⁸Muhammad Hasan, "Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal", *Al-Adalah*, Vol XII, No. 2, 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/219>. (7 Juni 2018), h. 891.

¹¹⁹Ibrāhīm al-Baijurī, *Op.Cit.*, h. 543.

“*Āmil* adalah seseorang yang dipergunakan/diperkerjakan oleh imam (pemimpin) untuk memungut zakat kemudian ia bagikan kepada orang yang berhak menerimanya”

Menurut Yūsūf al-Qardhāwī ialah:

الْعَامِلُونَ كُلُّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْجِهَازِ الْإِدَارِيِّ لِشُؤْنِ الزَّكَاةِ مِنْ جُبَاةٍ يَحْصِلُونَهَا
مِنْ خِزْنَةٍ وَ حَرِيسٍ يَحْرِصُونَهَا وَ مِنْ كِتَابَةٍ وَ حَاسِبِينَ يَضْبِطُونَ وَارِدَهَا وَ مَصْرُوفَهَا وَ
مِنْ مَوْرَعِينَ يُفَرِّقُونَهَا عَلَى أَهْلِهَا.¹²⁰

“*Āmil* adalah semua orang yang berkerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik yang berurusan dengan pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, perhitungan, dan orang yang membagikan kepada yang berhak yang menerimanya”

Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi ‘*āmil* yang harus dipenuhi adalah:

1. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat merupakan urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat dalam segala urusan mereka, kecuali yang tidak berurusan dengan pengumpulan dan pembagian zakat, seperti menjaga gudang.
2. Hendaklah seseorang *mukallaf*, yaitu orang yang *bāligh* dan baik akal sehatnya.¹²¹
3. Hendaklah seorang ‘*āmil* adalah orang yang merdeka, dan tidak diperkenankan bagi seorang hamba sahaya.
4. Hendaklah seseorang yang dapat dipercaya, karena zakat menyangkut hak orang banyak.

¹²⁰Yūsūf al-Qardhāwī, *Op. Cit.*, h. 579.

¹²¹Wahbah al-Zuhailī, *Ibid*, h. 586.

5. Hendaklah *'āmil* adalah orang yang mengerti dan paham dengan hukum-hukum zakat, karena apabila dia tidak paham dengan hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan zakat, maka tidak mungkin dia dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya.¹²²

4. Muallaf.

Kelompok penerima zakat yang keempat adalah *muallaf*. *Muallaf* merupakan golongan orang yang lemah keislamannya. Mereka diberikan bagian zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.¹²³ Para *fuqahā'* membagi golongan ini menjadi dua golongan yaitu *muallaf* kafir dan *muallaf* muslim.¹²⁴ Adapun *muallaf* kafir terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Orang kafir yang diharapkan keislamannya, seperti Shafwan bin Umayyah yang diberikan keamanan oleh Rasulullah S.A.W ketika penaklukan kota Makkah, dan diberikan pilihan selama empat bulan agar ia bisa berfikir dan memantapkan pilihannya dan sampai akhirnya Shafwan bin Umayyah pun memeluk agama Islam.
2. Orang kafir yang dikhawatirkan kejahatannya, ia diberikan bagian dari zakat agar ia tidak berbuat jahat. Hal ini pun terjadi di masa Rasulullah S.A.W, ketika Rasul memberi Abū Sufyān bin Harb, Aqra' bin Hābis, dan Uyainah bin Hishn 100 ekor unta, mereka berkata: "*Ini adalah agama yang baik*". Dan apabila mereka tidak diberi mereka akan mencaci serta mencela.¹²⁵

¹²²Ibrāhīm bin Ishāq al-Sayrāzī, *Kitab al-Tanbīh Fi Furū' al-Fiqh al-Syāfi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 55.

¹²³Wahbah al-Zuhailī, *Op. Cit.*, h. 871.

¹²⁴Ibrāhīm bin Ishāq al-Sayrāzī. *Loc. Cit.*,

¹²⁵Sayyid Sābiq, *Op. Cit.*, h. 277.

Adapun *muallaf* muslim terbagi menjadi empat golongan yaitu:

1. Orang-orang yang lemah keislamannya, mereka diberikan bagian zakat agar keislamannya kuat.
2. Seorang muslim yang terpendang di masyarakat/kaumnya, ia diberikan zakat dengan tujuan orang-orang yang sederajat dengannya dapat memeluk agama Islam.
3. Seorang muslim yang tinggal diperbatasan wilayah Islam bersebelahan dengan wilayah kafir, agar ia dapat menjaga umat muslim dari ancaman peperangan.
4. Orang yang menyerukan zakat pada suatu kelompok kaum yang sulit untuk dikirimkan utusan untuk memungut zakat, sekalipun mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.¹²⁶

5. *Riqāb*.

Kelompok penerima zakat yang kelima adalah *riqāb*. *Riqāb* adalah budak-budak *mukātab*.¹²⁷ *Mukātab* adalah budak yang telah memiliki perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia akan memberikan harta dengan nilai yang telah ditentukan dan ia akan berusaha untuk mendapatkannya, apabila itu semua telah ia penuhi, maka ia akan bebas.¹²⁸ Mereka diberikan bagian dari harta zakat agar dapat membantu dan menolongnya dalam membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.

6. *Ghārim*.

¹²⁶Wahbah al-Zuhailī. *Loc. Cit.*,

¹²⁷Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqī, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilāf al-Aimmah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), h. 85.

¹²⁸Yūsūf al-Qardhāwī, *Op. Cit.*, h. 616.

Kelompok penerima zakat yang keenam adalah *ghārim*. *Ghārim* adalah orang yang menanggung dan memiliki banyak hutang.¹²⁹ Secara garis besar *ghārim* dibagi menjadi dua bagian, yang *pertama* adalah orang yang berhutang untuk keperluan dirinya sendiri dan yang *kedua* adalah orang yang berhutang untuk keperluan atau kemaslahatan masyarakat umum. Untuk syarat-syarat *ghārim* bagian yang pertama adalah:

1. Hendaklah orang tersebut tidak mampu membayar seluruh atau sebagian hutangnya. Namun, apabila ia mampu bekerja dan mencari rezeki yang nantinya untuk membayar hutang-hutangnya, maka ia bisa mendapatkan bagian dari harta zakat.¹³⁰
2. Hendaklah ia berhutang untuk kebutuhan hidupnya serta keluarganya dalam hal yang *mubāh* (diperbolehkan syari'at). Maka apabila dia berhutang untuk sesuatu yang menjurus kepada kemaksiatan, maka ia tidak boleh mendistribusikan zakat kepadanya.
3. Hendaklah hutangnya yang sudah jatuh tempo, apabila hutangnya belum jatuh tempo maka tidak diberikan bagian dari harta zakat.¹³¹

Mengenai *ghārim* bagian yang kedua bahwasannya mereka mendapatkan bagian dari harta zakat tanpa ada syarat, dikarenakan mereka berhutang untuk kepentingan/maslahat masyarakat banyak, seperti: mendamaikan antara dua kubu yang sedang bersengketa, orang yang bergerak dibidang sosial seperti, membangun sekolah, mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yatim dan membangun masjid untuk kepentingan khalayak umum. Mereka diberikan

¹²⁹Sayyid Sābiq, *Op.Cit.*, h. 279.

¹³⁰Mu'īnan Rafi', *Op.Cit.*, h. 96.

¹³¹Ibrāhīm al-Bayjurī, *Op.Cit.*, h. 545.

sebagian dari harta zakat untuk menutupi hutangnya walaupun mereka dari golongan orang yang mampu/kaya.

7. *Sabīlillah.*

Kelompok penerima zakat yang ketujuh adalah *sabīlillah*. Ibn Katsīr dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa *sabīlillah* adalah orang yang berperang (mujahid) yang tidak mendapat hak/bagian dari gaji tentara,¹³² dan mereka diberikan bagian dari harta zakat apa-apa yang bisa membantu mereka dalam berperangan walaupun mereka termasuk orang yang kaya/mampu.¹³³ Akan tetapi ada beberapa ulama' yang mengartikan *sabīlillah* tidak hanya terbatas dalam berperangan saja, dalam hal ini al-Qaffāl mengutip beberapa pendapat beberapa *fuqahā'* bahwasannya diperbolehkan memberikan zakat untuk *jāmī' wujūh al-khair* (semua jenis kebajikan) seperti mengkafankan jenazah, membangun benteng pertahanan dan memakmurkan masjid, karena firman Allah S.W.T yang berbunyi "*fi sabīlillah*" mencakup semua kebajikan.¹³⁴ Bahkan Muhammad Jamāludiin al-Qāsīmī mengutip perkataan Ibn al-Atsīr bahwa lafadz *sabīlillah* itu umum, maka setiap amalan yang ikhlas yang hanya untuk mendekati diri kepada Allah S.W.T, seperti melaksanakan ibadah wajib, sunnah dan amalan-amalan baik lainnya masuk dalam katagori *sabīlillah*.¹³⁵

8. *Ibn al-Sabīl.*

¹³² Ismā'il bin Umar bin Katsīr al-Quraysī al- Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Adzhīm* (Riyādh: Dar Thaybah, 1999) Juz IV, h. 169.

¹³⁴ Yūsūf al- Qardhāwī, *Op. Cit.*, h. 640.

¹³⁵ Muhammad Jamāludiin al-Qāsīmī, *Mahāsin al-Ta'wīl* (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), Juz VIII, h. 3181.

Kelompok penerima zakat yang kedelapan adalah *ibn al-sabīl*. *Ibn al-sabīl* ialah orang yang akan atau sedang berpergian walaupun untuk tamasya atau pariwisata yang bukan untuk suatu kemaksiatan.¹³⁶ Golongan ini ada dua macam yaitu:

1. Orang yang terasing dari negerinya yang tidak punya sesuatu apapun untuk pulang. Golongan yang seperti ini termasuk yang berhak menerima zakat, ia diberikan sejumlah harta yang dapat menyampaikannya ke negerinya. Hal ini pun telah disepakati para ulama’.
2. Orang yang sedang berada di negerinya sendiri, akan tetapi ia akan berniat untuk melaukan perjalanan. Golongan yang seperti ini mayoritas ulama’ melarang untuk memberikannya zakat, akan tetapi Imam Syāfi’ī memperbolehkannya dengan ketentuan ia sama sekali tidak memiliki harta/uang untuk perjalanannya.¹³⁷

Ibn al-sabīl diberikan bagian dari harta zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tujuannya, hal ini apabila *ibn al-sabīl* sedang membutuhkan dalam perjalanannya walaupun ia dinegerinya termasuk orang yang kaya,¹³⁸ namun apabila ada kelebihan/sisa dari harta yang telah diberikan kepadanya maka ia harus mengembalikan sisanya.¹³⁹

B. Ketentuan Umum Tentang Hutang Piutang.

1. Pengertian Hutang Piutang.

Hutang piutang dalam bahasa Arab disebut *al-dain*. Secara bahasa *al-dain* adalah kata tunggal *al-duyūn* atau *al-adyūn* yang memiliki arti setiap sesuatu yang

¹³⁶Sulaimān bin Muhammad al-Bujayromī, *Op.Cit.*, h. 85.

¹³⁷Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Op.Cit.*, h. 267.

¹³⁸Wahbah al-Zuhailī, *Op.Cit.*, h. 875.

¹³⁹Ibrāhīm bin Ishāq al-Sayrāzī, *Op.Cit.*, h. 56.

tidak ada.¹⁴⁰ Dan secara terminologi hutang piutang adalah suatu istilah untuk suatu harta *hukmī* yang berada dalam tanggungan. Dalam bahasa Arab redaksi kata hutang yaitu dengan menggunakan huruf *'ālā* dan piutang menggunakan huruf *lām*, seperti perkataan orang Arab: “*'ālayya al-dain*” yang artinya aku mempunyai hutang dan “*lī al-dain*” yang artinya aku mempunyai piutang.

Ahmad Khumedi Ja'far mendefinisikan hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.¹⁴¹

Selanjutnya beliau pun menegaskan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam hutang piutang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antar lain:

- a. Tulislah nama orang yang memberikan hutang dan nama orang yang berhutang.
- b. Tulislah alamat rumah orang yang berhutang.
- c. Tulislah jumlah uang atau benda yang hutangkan.
- d. Tulislah hari, tanggal, bulan, tahun terjadinya hutang piutang dan kapan waktu pengembaliannya.

¹⁴⁰Jamāluddīn bin Muhammad bin Mukrim bin Mandzūr al-Ifriqī al-Mishrī, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dār Shādir, 1997) Juz XIII, h. 167.

¹⁴¹Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Permatanet Publishing, 2016), h. 123.

- e. Berilah tanda terima, baik berbentuk kwitansi atau nota kepada orang yang berhutang sebagai ikatan perjanjian yang telah ditandatangani oleh yang berhutang, yang memberikan hutang dan para saksi.

Ketentuan-ketentuan di atas mengacu kepada firman Allah S.W.T yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بَلَّغٌ عَدْلٌ ... ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Mengenai ayat di atas, seorang *mufasssir* Syekh Muhammad ‘Alī al-Shābūnī mengatakan dalam kitab tafsirnya *shofwah al-Tafāsīr* bahwa hal ini adalah suatu arahan atau petunjuk dari Allah S.W.T untuk hamba-hambanya secara langsung agar mencatat atau menulis pada transaksi yang *mu’ajjal* (bertempo), hal ini bermaksud agar lebih terjaga dan yakin pada jumlah dan batas akhir yang telah ditentukan.¹⁴²

2. Dasar Hukum Hutang Piutang.

Hutang piutang pada dasarnya hukumnya adalah *sunnah*, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga hutang piutang sering diidentikan sebagai tolong menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢١٧﴾

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....” (Q.S. Al-Maidah: 2).

¹⁴²Muhammad ‘Alī al-Shābūnī, *Shofwah al-Tafāsīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 2001) Juz I, h. 161.

Dalam *hadīts* juga Rasulullah S.A.W bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ).¹⁴³

“Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya” (H.R. Muslim).

Pada dasarnya hukum berhutang adalah *mubāh* (boleh). Akan tetapi hukum ini bisa berubah dengan berubahnya kondisi atau keadaan orang yang berhutang, seperti haram apabila ia berhutang untuk bermaksiat dan berbuat keji. Begitupun hukum memberikan hutang bisa berubah menjadi haram apabila ia mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan harta yang dipinjam untuk berbuat yang melanggar syariat. Hal ini sesuai dengan *qā'idah fiqhiyyah* sebagai berikut:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.¹⁴⁴

“Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dapat berubah seiring berubahnya waktu”

Walaupun pada dasarnya hukum berhutang adalah boleh, akan tetapi Islam sering mengingatkan dan menganjurkan seorang muslim agar menahan dirinya agar tidak berhutang. Hal ini disebabkan karena berhutang tanpa disadari dapat membuat tersiksa dan gelisah dengan hutangnya. Rasulullah S.A.W pun mengajarkan umatnya untuk berdoa agar terbebas dari lilitan hutang, sebagaimana *hadīts* yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ يُقَالُ لَهُ أَبُو أَمَامَةَ فَقَالَ : يَا أَبَا أَمَامَةَ

¹⁴³Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Op. Cit.*, h. 239.

¹⁴⁴Rāfi' bin Abdul Hādī Abdullah al-Shagīr “Qā'idah Lā Yunkiru Taghayuru al-Ahkām Bi Taghayuri al-Azmān: Ta'shīl Wa Thatbīq Wifq Ahkām al-Fiqh” *Scientific Journal of Faculty of Education Misurata University*, Vol I, No. 7, 2017, h. 8.

مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَالَ : هُمُومٌ لَزِمْتَنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَآمَسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).¹⁴⁵

“Dari Abu Said al-Khudri R.A berkata, pada suatu hari Rasulullah S.A.W masuk ke dalam masjid dan beliau sedang bersama seorang laki-laki dari kaum Anshār yang bernama Abū Umāmah seraya berkata: Wahai Abū Umāmah, mengapa aku melihatmu duduk di masjid pada selain waktu salat. Maka ia berkata: kegundahan dan hutang menimpaku wahai Rasulullah. Rasul pun berkata: maukah engkau kuberitahu suatu doa yang apabila engkau membacanya, Allah S.W.T akan menghilangkan kegundahanmu dan membayar hutangmu, maka aku berkata: mau wahai Rasulullah, maka Rasulullah berkata: Bacalah doa apabila engkau berada diwaktu pagi maupun petang: Ya Allah, sesungguhnyaaku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, kikir dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang”. (H.R. Abū Daud)

3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang.

Rukun hutang piutang ada empat, yaitu:

a. Al-‘āqidāni.

Yang dimaksud dengan *al- āqidāni* ialah kedua belah pihak yang melangsungkan transaksi yaitu pemberi hutang dan penerima hutang. Adapun syarat *al- āqidāni* hendaklah merdeka, *bāligh*, berakal sehat dan *rasyīd* (cakap bertindak hukum).¹⁴⁶

b. Harta yang dihutangkan.

Harta yang dihutangkan memiliki beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁴⁵Sulaimān bin al-Asy’ats al-Sajistānī, *Op.Cit.*, h. 93.

¹⁴⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 335.

- 1) Hendaklah harta yang dihutangkan merupakan *māl al-mitsliyyāt* yaitu harta yang dapat ditakar (*makīlāt*), harta yang dapat ditimbang (*mauzūnāt*), harta yang dapat diukur (*zari'yat*), harta yang dapat dihitung (*adiyyāt*).¹⁴⁷
- 2) Hendaklah harta yang dihutangkan dapat diperjual-belikan, baik itu jenis harta *makīlāt*, *mauzūnāt*, *zari'yat* ataupun *adiyyāt*. Maka atas dasar ini tidak sah menghutangkan manfaat atau jasa.¹⁴⁸
- 3) Harta yang dihutangkan hendaklah diketahui kadar dan sifatnya.
- 4) Harta yang dihutangkan hendaklah *māl al-mutaqawwim* (bernilai harta) dan dibenarkan oleh syari'at.

c. *Al-qabdh*.

Al-qabdh ialah serah terima. Akad hutang piutang tidak akan sah kecuali dengan adanya serah terima, karena dalam praktek transaksi hutang piutang merupakan akad *tabarru'* dan akad *tabarru'* tidak sempurna kecuali dengan serah terima. Hal ini sesuai dengan *qāidah fihiyyah* yang berbunyi:

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِقَبْضٍ.
“Tidaklah sempurna akad *tabarru'* kecuali dengan *al-Qabdh* (serah terima)”.¹⁴⁹

d. *Shīghat*.

Akad hutang piutang dinyatakan sah dengan adanya *ījāb* dan *qabūl*. Dan mayoritas *fuqaha'* berpendapat bahwa *ījāb* dan *qabūl* sah dengan lafaz hutang piutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya. Seperti: “*Aku*

¹⁴⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 232.

¹⁴⁸Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 154.

¹⁴⁹Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Surabaya: Prenada Media, 2014), h. 79.

memberimu hutang” atau “*Aku menghutangimu*” dan diikuti *qabūl* dari penerima hutang mengucapkan “*Aku berhutang*” atau “*Aku menerima*”.

4. Hikmah dan Manfaat Disyariatkannya Transaksi Hutang Piutang.

Di antara hikmah dan manfaat disyariatkannya transaksi hutang piutang antara lain:

- a. Memperkuat ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. Sebagaimana firman Allah S.W.T:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujarat: 10).

- b. Melaksanakan serta merealisasikan perintah Allah S.W.T agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana yang tertulis dalam surat al-Maidah ayat 2.¹⁵⁰

¹⁵⁰Mardani, *Op.Cit.*, h. 336.

BAB III

PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM SYĀFĪ TENTANG ZAKAT BAGI HARTA PUITANG

A. Imam Mālik.

1. Biografi Imam Mālik dan Latar Belakang Pendidikannya.

Nama lengkap Imam Mālik adalah Abū ‘Abdillah Mālik bin Anas bin Mālik bin Ābi ‘Āmir bin ‘Amr bin al-Hārīts bin Ghaimān bin Khutsail bin ‘Amr bin al-Hārīts bin ‘Auf bin Mālik bin Zaid bin Syaddād bin Zur’ah al-Ashbahī al-Madanī. Dan nama ibunya adalah ‘Āliyyah binti Syarīk al-Azdiyah.¹⁵¹ Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *Dzū Ashbah* di kota Himyār jajahan negeri Yaman.¹⁵²

Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H, yang pada tahun inipula wafat pembantu Rasulullah S.A.W yang bernama Anas.¹⁵³ Imam al-Wāqidī berkata: “*Beliau berada di kandungan ibunya selama 3 tahun*”.¹⁵⁴ Beliau wafat pada hari Ahad 10 Rabī’ul Awal pada tahun 179 dan dimakamkan di Baqī’ menurut pendapat yang disepakati *Mālikiyyah*.¹⁵⁵ Dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada saat umur beliau 84 tahun. Beliau mempunyai empat anak menurut riwayat mayoritas *Mālikiyyah*. Anak-anak Imam Mālik yaitu Yahyā, Muhammad, Hammād dan Fāthimah.¹⁵⁶

¹⁵¹ Muhammad bin Ahmad bin Utsmān Al-Dzahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Juz VIII (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996), h. 49.

¹⁵² Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 103.

¹⁵³ Muhammad bin Ahmad bin Utsmān Al-Dzahabī, *Loc.Cit.*,

¹⁵⁴ Yūsuf bin Hasan Abdul Hādī, *Irsyād al-Sālik Ilā Manāqibi Mālik* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009), h. 142.

¹⁵⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc.Cit.*,

¹⁵⁶ Abdurrahman bin Abdullah al-Syi’lānī, *Ushūl al-Fiqh al-Imām Mālik: Adillatuhu al-Naqliyyah*, Juz I (Riyādh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Whathaniyyah Atsnā’ al-Nasyr, 1224 H), h. 172.

Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kurang mampu dalam bidang material, akan tetapi keluarga tersebut kaya dalam bidang spiritual, taat dalam melaksanakan ajaran Islam, dan menguasai ilmu agama terutama *hadīts-hadīts* Rasulullah S.A.W. Kakek Imam Mālik termasuk ulama' tabi'in yang banyak meriwayatkan *hadīts* Rasulullah S.A.W yang didapatkan riwayatnya dari 'Umar bin al-Khattāb, Utsmān bin 'Affān dan Thalhah.¹⁵⁷

Imam Mālik mulai belajar dengan para guru-gurunya ketika berumur 10 tahun. Beliau belajar dengan sungguh, giat, kesabaran dan ketabahan terlebih dalam memahami ilmu *fiqh* dan *hadīts*, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesuksesannya serta berkembanglah mazhabnya.¹⁵⁸ Hal ini terbukti dengan jumlah guru-guru beliau yang berjumlah 900 guru, 300 di antaranya adalah termasuk tabi'in,¹⁵⁹ antara lain: Nāfi', Sa'id al-Maqburī, Ibn Syihāb, Nu'aim al-Mujmir, Ibn al-Munkadir, Muhammad bin Yahyā bin Hibbān, Ishāq bin Abdullah bin Abī Thalhah, Ayyūb al-Sakhtiyānī, Zaid bin Aslam, Zaid bin Abī Anāsah, Shuhail bin Abī Shaleh, Shofwān bin Sulaim, 'Āmir bin Abdillāh bin Zubair, 'Abdullah bin Dīnār, 'Abdurrahman bin Qāsim, bin Muhammad, Wahab bin Kīsān dan masih banyak lainnya.¹⁶⁰

Imam Mālik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalīfah Sulaimān bin Abdul Mālik dari Bani Umayyah VII.¹⁶¹ Pada waktu itu kota Madinah merupakan kota yang kaya dengan ilmu pengetahuan tentang *hadīts*

¹⁵⁷M Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 59.

¹⁵⁸Yūsuf bin Hasan Abdul Hādī, *Op.Cit.*, h. 147.

¹⁵⁹Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2012), h. 183.

¹⁶⁰Yūsuf bin Hasan Abdul Hādī, *Op.Cit.*, h. 153.

¹⁶¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc.Cit.*

nabawiyah, banyak para tabi'in yang paham dan mengerti dengan hukum agama dan penuh dengan peninggalan ilmu dari para sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W. Dalam suasana seperti itulah Imam Mālik tumbuh dan mendapat pendidikan dan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga pada usia yang masih terbilang muda beliau sudah dapat memberikan fatwa. Di antara teman sebaya beliau yang belajar dan mengambil ilmu denganya yaitu Abū Hanīfah, al-Laits bin Sa'ad, Muhammad bin Hasan dan lain-lainya. Dan para ulama' yang hidup pada masa itu bersepakat atas kepemimpinan, penguasaanya beliau dalam ilmu *hadīst* dan *fiqh*, baik dalam menyimpulkan dan mengeluarkan suatu hukum yang diiringi dengan sifat *wara'* (kehati-hatian) dan ketakwaan.¹⁶² Imam Mālik diberi gelar *Imām Dārul Hijrah* (pemimpin rumah hijrah/Madinah) karena beliau adalah seorang Mufti yang dipercaya umat pada saat itu.

2. Pola Pemikiran Dan Metode *Istidlāl* Imam Mālik.

Imam Mālik adalah seorang ahli di bidang *hadīts* dan *fiqh*, semua itu beliau dapatkan karena keteguhan hati, kesabaran dan sangat memuliakan ilmu. Karena itu semua, Imam Mālik tumbuh dan menjadi seorang ulama' yang dikenal. Hal ini terbukti dari perkataan yang diriwayatkan Abū 'Umar bin Abd al-Bar: "*Rab'ah bin 'Abdurrahman adalah salah satu guru Imam Mālik. Hal yang mengejutkan terjadi ketika Imam Mālik sudah tidak belajar lagi dengannya dan Imam Mālik pun sudah mulai mengajar, aku melihat bahwasannya para murid-murid Imam Mālik lebih banyak dari pada gurunya pada saat beliau mengajar*".¹⁶³ Maka atas dasar itulah Imam Mālik dapat menulis 100.000 *hadīts* dengan tangannya

¹⁶²Alī Jum'ah Muhammad, *Loc. Cit.*,

¹⁶³Yūsūf bin Hasan Abdul Hādī, *Op. Cit.*, h. 149.

sendiri. Dan beliau mulai mengajar saat umur beliau 19 tahun dan orang-orang beramai-ramai untuk belajar dengan beliau seperti beramai-ramainya orang-orang yang mengharapkan pemberian dari para pemerintah.¹⁶⁴

Sebagai seorang yang dikenal dengan keluasaan dan kepahaman tentang ilmu *fiqh* dan *hadīts*, akan tetapi beliau tidak mudah untuk memberikan fatwa dan hukum tentang pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini pernah terjadi ketika beliau hanya menjawab 4 dari tentang 40 pertanyaan dan beliau berkata: “*Untuk sisa pertanyaannya wallahu a’lam (hanya Allah S.W.T yang lebih mengetahui)*”. Dan hal yang serupa pernah beliau katakan dengan lisannya:

مَا أَفْتَيْتُ حَتَّى شَهِدَ لِي سَبْعُونَ أُنِي أَهْلٌ لِدَالِكَ.¹⁶⁵

“*Tidaklah aku akan memberikan fatwa kecuali tujuh puluh orang bersaksi bahwa aku orang yang pantas memberikan fatwa*”

Adapun metode *istidlāl* yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum Islam adalah:

1. *Al-Qur’ān*.

Dalam memegang *al-Qur’ān* ini meliputi *istidlāl* (pengambilan hukum) berdasarkan *nash al-Qur’ān*, *dzāhir al-Qur’ān* dan *maf’hūm al-Qur’ān*.¹⁶⁶

2. *Al-Sunnah*.

¹⁶⁴Zein bin Ibrāhīm bin Sumaith, *al-Manhāj al-Sāwī Syarh Ushūl Tharīqah al-Sādah Āl Bā’alawī* (Tarim: Dār al-Ilmi Wa al-Da’wah, 2008), h. 415.

¹⁶⁵Ahmad bin Abdullah al-Ashfahānī, *Hilyah al-Auliyā’ Wa Thabāqāt al-Ashfiyā’* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), Juz VI, h. 316.

¹⁶⁶Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1995), h. 52.

Dalam berpegang dengan *al-sunnah* ini meliputi *istidlāl* (pengambilan hukum) berdasarkan *nash al-Hadīts*, *dzāhir al-Hadīts*, *mafḥūm al-Hadīts*, *tanbīh al-Hadīts*, dan *daīl al-Hadīts*.¹⁶⁷

3. *Ijma' Ahl al-Madīnah*.

Ijma' ahl al-Madīnah merupakan sandaran hukum bagi Imam Mālik. Akan tetapi beliau membedakan antara *ijmā' al-Ummah* dan *ijmā' ahl al-Madīnah*. Hal ini beliau tegaskan dengan pernyataannya:

لَمْ أَخُذْ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً إِلَّا بَعْدَ أَنْ أُعْرِضَهَا عَنِّي آيَةَ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَعَمَلِ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ.¹⁶⁸

“Aku tidak menghukumkan satu masalah kecuali setelah aku melihat di dalam ayat (*al-Qur'ān*), *al-Sunnah*, *ijmā' umat* dan amalan orang Madinah”.

Dalam studi mazhab Imam Mālik, *ijmā' ahl al-Madīnah* ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan *ahl al-Madīnah* yang asalnya adalah *naql* bukan berdasar dari *ijtihād*, seperti tentang ukuran *mud* dan *sha'*. *Ijma'* semacam ini merupakan hujjah bagi Imam Mālik.
- 2) *Amal ahl al-Madīnah* sebelum terbunuhnya Khalīfah Utsmān bin 'Affān. *Ijmā' ahl al-Madīnah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan *hujjah* bagi mazhab Mālikī. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada '*amal ahl al-Madīnah* masa itu yang bertentangan dengan *sunnah* Rasulullah S.A.W.

¹⁶⁷ Abdul Wahab Afif, *Loc.cit.*,

¹⁶⁸ Abdurrahman bin Abdullah al-Syi'lānī, *Op.Cit.*, h. 1011.

- 3) *'Amal ahl al-Madīnah* yang dijadikan pendukung atau *pentarjih* atas dua dalil yang *ta'arudh* (bertentangan). Maksudnya adalah apabila ada dua dalil yang bertentangan, sedang salah satu dari kedua dalil itu ada yang merupakan *'amal ahl al-Madīnah*, maka dalil yang *ditarjih*kan oleh *'amal ahl al-Madīnah* itulah yang dijadikan *hujjah* bagi mazhab Mālikī.
- 4) *'Amal ahl al-Madīnah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Rasulullah S.A.W. *'Amal ahl al-Madīnah* seperti ini bukan merupakan *hujjah* bagi mazhab Mālikī.¹⁶⁹

4. Fatwa Sahabat.

Fatwa sahabat adalah *Kibār al-Shahābah* (sahabat besar), yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql* bukan dari *ijtihad* para sahabat. Artinya, yang dimaksud dengan fatwa sahabat adalah yang berwujud *hadīts-hadīts* yang wajib diamalkan. Menurut Imam Mālik, para *kibār al-shahābah* tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah S.A.W. Akan tetapi beliau juga mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan *hadīts marfū'*.¹⁷⁰

5. *Khabar Āhād* dan *Qiyās*.

Imam Mālik tidak mengakui *khabar āhād* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah S.A.W, jika *khabar āhād* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbāth*, kecuali *khabar āhād* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qathī*. Dalam menggunakan *khabar āhād* ini, Imam Mālik tidak selalu konsisten. Kadang-

¹⁶⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 107.

¹⁷⁰*Ibid*, h. 108.

kadang ia mendahulukan *qiyās* dari pada *khābar āhād*. Kalau *khābar āhād* itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khābar āhād* ini tidak benar berasal dari Rasulullah S.A.W. Dengan demikian, *khābar āhād* tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyās* dan *maslahah*.¹⁷¹

6. *Al-Istihṣān*.

Al-Istihṣān secara etimologi ialah:

عَدَّ الشَّيْءُ حَسَنًا.¹⁷²

“Menjadikan/menganggap sesuatu menjadi baik”. Secara terminologi ialah:

أَنْ يَّعْدِلَ الْمُجْتَهِدُ عَمَّا كَانَ يُحْكَمُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ فِي نَظَائِرِهَا لِوَجْهِ أَقْوَى تَقْتَضِي الْعُدُولَ عَنِ الْأَوَّلِ.

“Beralihnya seorang mujtahid waktu menetapkan hukum dalam suatu masalah seperti apa yang berlaku dalam yang sebanding dengannya, karena ada yang mendorongnya untuk beralih dari yang pertama”.¹⁷³

Dari pengertian di atas terlihat bahwa *al-Istihṣān* itu terlihat bentuk pergeseran penggunaan dalil kepada yang dianggap *mujtahid* lebih kuat. Artinya, *al-Istihṣān* itu selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak dari suatu ketentuan hukum harus mendatangkan maslahat atau menghindarkan *madharah*.

7. *Maslahah al-Mursalah*.

¹⁷¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc. Cit.*,

¹⁷²Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul al-Fiqh Wa Khalāsah al-Tasyri' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 1996), h. 76.

¹⁷³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 60.

Maslahah al-Mursalah atau yang disebut *al-Mutlaqah* menurut ahli *ushūl al-Fiqh* ialah:

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَيْنٍ إِعْتِبَارِهَا
أَوْ إِلْغَائِهَا.¹⁷⁴

“Suatu kemaslahatan yang tidak disyariat’kan oleh syāri’ (Allah dan Rasulnya) suatu kepastian hukumnya dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar’i untuk mengi’tibarkannya atau membatalkannya”

Para ulama’ yang menjadikan *maslahah al-mursalah* sebagai dasar hukum menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Hendaklah *mashlahah* itu memang benar-benar ada bukan *mashlahah wahmiyyah* (angan-angan). Artinya, bahwa penetapan hukum ini nyatanya memang benar-benar mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan, bukan hanya berdasarkan *wahmiyyah* (angan-angan).
- 2) Hendaklah *mashlahah* itu untuk kepentingan universal bukan kepentingan individual atau sebagian kelompok semata.
- 3) Hendaklah *mashlahah* itu tidak bertentangan dengan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijmā’*. Seperti mengatakan dalam hukum kewarisan bagian anak laki-laki itu sama dengan bagian anak perempuan.¹⁷⁵

Ada beberapa alasan mengapa *maslahah al-mursalah* dapat dijadikan metode dalam merumuskan hukum. *Pertama*, mewujudkan kebaikan . yakni hal-hal yang diperlukan untuk menegakkan kehidupan atas dasar yang sebaik-baiknya. *Kedua*, menghilangkan keburukan (kerugian), yakni hal-hal yang

¹⁷⁴Abdul Wahhāb Khallāf, *Op.Cit.*, h. 80.

¹⁷⁵*Ibid*, h. 82.

merugikan manusia, baik kerugian materil atau moril. *Ketiga*, menutup jalan, hal ini didasarkan karena seringkali perbuatan yang dilarang dalam *syara'* sebenarnya bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena bisa mendatangkan perbuatan lain meskipun tidak disengajakan yang memang benar-benar dilarang, melainkan karena bisa mendatangkan perbuatan lain, dalam istilah lain adalah *al- Ihtiya 'alā al-Qānūn. Keempat*. Perubahan masa. Hal ini didasarkan kaidah *taghayur al- ahkām bi al- tahgayur al- azmān*.¹⁷⁶

8. *Sad al-Zarā'ī*.

Sad al- Zarā'ī menurut ahli *ushūl al-Fiqh* ialah menutup/menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.¹⁷⁷

Imam Mālik menjadikan *sad al- zarā'ī* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya adalah haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal hukumnya.¹⁷⁸

9. *Istishāb*.

Secara etimologi *istishāb* diambil dari perkataan:

إِسْتَصْحَبْتُ مَا كَانَ فِي الْمَاضِي.¹⁷⁹

“Aku membawa serta apa yang telah ada waktu yang lampau sampai sekarang”

Sedangkan menurut terminologi ialah:

¹⁷⁶M. Sidiq Purnomo, “Reformulasi Masalah al-Mursal al-Syāthbī”, *Al- 'Adalah*, Vol. X, No. 2, 2011, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2011), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/260>. (8 Agustus 2018), h. 199.

¹⁷⁷A. Hanafie, *Usul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1989), h. 147.

¹⁷⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 112.

¹⁷⁹A. Hanafie, *Op.Cit.*, h. 141.

أَحْكَمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْحَالِ الَّتِي كَانَ عَ لَيْهَا مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَغْيِيرِ تِلْكَ
الْحَالِ أَوْ هُوَ جَعَلَ الْحُكْمَ الَّذِي كَانَ ثَابِتًا فِي الْمَاضِي بَاقِيًا فِي الْحَالِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ
عَى تَغْيِيرِهِ¹⁸⁰

“*Hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil yang mengubah keadaan itu atau menjadikan suatu hukum yang telah tetap pada masa lalu ada sampai masa sekarang sampai adanya dalil yang mengubahnya*”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, *istishāb* ialah segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau ada yang telah mengubahnya dan segala hukum yang ada pada masa sekarang tentu telah ditetapkan pada masa lalu.¹⁸¹

10. *Syar'u Man Qoblanā Syar'un Lanā.*

Menurut Qadhi Abdul Wahhāb al-Mālikī, bahwa Imam Mālik menggunakan kaidah *syar'u man qoblanā syar'un lanā*. Akan tetapi menurut Sayyid Muhammad Mūsā, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Mālik yang menyatakan demikian.¹⁸²

Abdul Wahhāb Khallāf menjelaskan masalah ini dalam bukunya “*Ilmu Ushūl al-Fiqh Wa Khalāshah al-Tasyrī' al-Islāmī*” bahwasannya apabila *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* telah menceritakan hukum-hukum yang telah berlaku untuk umat sebelum kita dengan perantara rasul-rasul mereka dan hukum-hukum tersebut telah *dinashkan* oleh Allah S.W.T dalam *al-Qur'an* maka sudah jelas hukum-hukum tersebut menjadi syari'at untuk kita. Akan tetapi, apabila ada dalil *syar'i* baik dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* meyakinkan bahwa hukum-hukum telah

¹⁸⁰ Abdul Wahhāb Khallāf, *Op.Cit.*, h. 87.

¹⁸¹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 47.

¹⁸² Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc.Cit.*,

dinaskh, maka tidak ada perbedaan bahwa semua itu bukan termasuk dalam kategori syari'at untuk kita karena ada dalil *nāsikh* (yang menghapusnya).¹⁸³

3. Karya-karya Imam Mālik, Murid-muridnya serta Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya.

Imam Mālik seorang ulama' kharismatik, berpengetahuan luas, dan ahli di bidang *fiqh* dan *hadīts*, beliau tidak hanya mengajar dan membagikan ilmu yang beliau dapatkan semasa belajar hanya kepada orang-orang yang hidup pada saat itu saja, akan tetapi Imam Mālik juga menulis kitab, agar orang yang hidup setelah beliau wafat dapat merasakan dan menikmati ilmu yang dari beliau. Karya-karya Imam Mālik banyak sekali jumlahnya. Sebagian ada yang tidak dicetak menjadi buku dan sebagian sudah dicetak menjadi buku sehingga kita dapat merasakannya sampai saat ini. Adapun karya beliau yang tidak dicetak antara lain:

- 1) *Risālah* (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Ibn Wahb yang didalamnya menjelaskan *Qadr*.
- 2) Karangan beliau tentang tafsir *al-Qur'ān* yang khusus membahas *gharīb al-Qur'ān*.
- 3) *Risālah* (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Muhammad Bin Mathraf yang berisikan tentang fatwa.
- 4) *Risālah* (tulisan kecil) yang membahas tentang *al-'Aqdhiyah*.
- 5) Karangan beliau yang membahas tentang *al-Manāsik*.
- 6) *Sir* atau *Siyar* yang menjelaskan tentang sejarah.

¹⁸³Abdul Wahhāb Khallāf, *Op.Cit.*, h. 89.

7) Membahas tentang *nujūm* (bintang), perhitungan zaman/waktu dan *manāzil* bulan.

Adapun karya-karya beliau yang telah dicetak antara lain:

- 1) *Risālah* (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada al-Laits bin Sa'ad.
- 2) *Risālah* (tulisan kecil) tentang adab dan nasehat.
- 3) *Al-Muwatha'*.¹⁸⁴

Karya beliau yang paling populer hingga saat ini kita masih dapat merasakannya adalah *al-Muwatha'*. Kitab *hadīts* yang sering dipelajari dan dikaji bahkan dijadikan rujukan dalam ilmu *fiqh*. Dalam menulis kitab *al-Muwatha'*, beliau menghabiskan waktu untuk menulisnya selama 40 tahun. Hal ini disebabkan karena kehati-hatian dan rasa *ta'dzim* beliau dalam menulis *hadīts-hadīts* Rasulullah S.A.W.

Cara penulisan kitab *al-Muwatha'* ini mengandung dua aspek, yaitu aspek *hadīst* dan aspek *fiqh*. Aspek *hadīts* itu karena dalam kitab ini banyak sekali mengandung *hadīts-hadīts* yang berasal dari Rasulullah S.A.W, sahabat dan tabi'in. *Hadīts-hadīts* yang terdapat dalam kitab *al-Muwatha'* ada yang bersanad lengkap, ada yang *munqathi'*, seperti *hadīst* yang beliau dapatkan dari Abdul Karīm bin Abī al-Makhāriq, Muhammad bin 'Uqbah dan 'Umar bin Husein, dan adapula yang bersanad *mursal*, seperti *hadīts* yang beliau dapatkan dari Zuhri, Yahyā al-Anshāri dan Hisyām bin 'Urwah. Yang kedua adalah aspek *fiqh*, hal ini dikarenakan metode penyusunannya berdasarkan bab pembahasan seperti kitab

¹⁸⁴Abdurrahman bin Abdullah al-Syi'lānī, *Op.Cit.*, h. 286.

fiqh pada umumnya yaitu bab pertama diawali dengan bab *thahārah* (bersuci), dilanjutkan dengan bab salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya.

Salah satu faktor atau sebab karya-karya beliau dapat tersebar di belahan penjuru dunia ialah banyaknya jumlah murid-murid beliau yang menggali ilmu dan belajar dengannya. Di antara murid-murid beliau antara lain:

- Ahmad bin Abū Bakar keturunan sahabat ‘Abdurrahman bin ‘Auf. Beliau mempelajari dan meriwayatkan kitab *al-Muwattha’* dari Imam Mālik. Dan banyak yang mengambil *hadīts* darinya antara lain, Imam Bukhāri, Imam Muslim, Abū Daud, Tirmidzī, Ibnu Mājah. Beliau adalah orang yang jujur, ahli *fiqh*, dan pernah menjadi *Qadhī* di kota Madinah dan beliau wafat pada tahun 241 H dan pada saat itu menjabat sebagai *Qadhī*.
- Asyhab bin ‘Abdul ‘Azīz bin Daud bin Ibrāhīm. Di antara yang mengambil mengambil *hadīts* darinya yaitu, Yūnus bin ‘Abdul ‘A’lā, Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Hakīm, Ibn al-Mawwāz, Syahnūn dan ‘Abdul Mālik bin Hubaib. Beliau seseorang yang ahli di bidang *fiqh* hingga Imam Syāfi’ī memujinya dengan “*Tidak pernah aku melihat orang yang faqīh melebihi Asyhāb*”, sehingga fatwa-fatwa Imam Mālik yang di dalam kita *al-Mudawwanah al-Kubrā* banyak mengambil riwayat darinya. Dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H.
- Sawīd bin Sa’īd al-Hadatsānī. Beliau bertemu dengan Imam Mālik dan meriwayatkan *al-Muwattha’*. Beliau adalah seseorang yang gemar berkelana untuk mencari *hadīts* hingga ke Makkah, Madinah, Syam, Irak dan Mesir. Di

antara ulama' yang meriwayatkan darinya ialah: Imam Muslim, Ibnu Mājah, Ibn Uyaynah dan Ibn Hazm. Dan beliau wafat pada tahun 240 H.¹⁸⁵

Masih banyak lagi murid-murid Imam Mālik yang menyebarkan ilmunya dan juga menyebarkan mazhab Imam Mālik. Pada awalnya penyebaran mazhab Māliki hanya berkembang di kota Madinah dan sekitarnya, akan tetapi setelah murid-muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia setelah kembalinya mereka ke Negara masing-masing harus mengembangkan ilmu yang didapatnya. Adapun yang menyebarkan mazhab Māliki di Mesir antara lain 'Utsmān bin Hakam al-Judzami, Khālid bin Yazīd bin Yahyā, 'Abdurrahman bin al-Qāsimī, Asyhab bin 'Abdul 'Azīz, Ibnu Abdil Hakam, Hāris bin Miskīn.

4. Pendapat Imam Mālik Tentang Zakat Bagi Harta Piutang.

Dalam konsep kepemilikan harta dalam Islam, harta secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Milk al-Tām*, yaitu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda dan kegunaannya dapat dikuasai.
- b. *Milk al-Naqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya saja atau memiliki manfaat tanpa memiliki bendanya (zatnya).¹⁸⁶

Dilihat dari segi *mahal* (tempat), kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Milk al-Āin* atau sering disebut *milk al-Raqabah*, yaitu memiliki segala benda, baik benda *ghairu al-Manqūl* (yang tetap), maupun benda *manqūl* (yang

¹⁸⁵Abdurrahman bin Abdullah al-Syi'lānī, *Op.Cit.*, h. 243.

¹⁸⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 40.

dapat dipindahkan), seperti kepemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor. Kepemilikan terhadap benda-benda tersebut disebut dengan *milk al-'Ain*.

- b. *Milk al-Manfa'ah*, yaitu seseorang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda dari hasil pinjaman, wakaf dan lainnya.
- c. *Milk al-Dain*, yaitu pemilikan karena adanya hutang, misalnya sejumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang.

Berdasarkan pengelompokan kepemilikan di atas para ulama' berbeda pendapat tentang zakat bagi harta piutang. Apakah harta yang berada di tangan orang lain yang esensinya dipinjamkan berdasarkan untuk saling membantu dan tolong menolong wajib dizakati atau tidak, apabila telah mencapai *nishāb* dan telah lewat dari satu tahun semenjak kepemilikannya ?.

Permasalahan zakat Allah S.W.T telah memerintahkannya secara tegas di dalam *al-Qur'ān*, akan tetapi *al-Qur'ān* tidak menjelaskan secara rinci apakah zakat tersebut diwajibkan atas harta piutang atau tidak, atau siapakah yang wajib mengeluarkan zakatnya, apakah pemberi piutang selaku pemilik aslinya ataukah penerima hutang selaku yang menikmati dan mendapatkan manfaat dari harta itu. Dan inilah yang menjadi perdebatan, perbedaan pendapat dan diskusi di kalangan ulama'.

Sebelum membahas dan mengetahui lebih dalam pendapat Imam Mālik tentang zakat piutang, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang pembagian piutang, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh *jumhūr fuqahā'*. Dan pembagian itu adalah sebagai berikut:

- a. Piutang yang berada di bawah kekuasaan orang membenarkan piutang itu, mengakui jumlah kadar piutangnya dan berusaha untuk melunasinya. Piutang seperti ini disebut dengan *marjū al-adā'*.
- b. Piutang yang berada di bawah kekuasaan orang yang mengakui piutang itu, akan tetapi penghutang mempersulit dan menunda-nunda pembayaran atau orang yang menyangkal/mengingkari. Piutang yang seperti ini disebut dengan *ghairu marjū al-adā'*.

Setelah mengetahui dan memahami pembagian piutang di atas, maka penulis akan menjelaskan pendapat Imam Mālik. Dalam hal ini Imam Mālik memiliki pendapat tersendiri, yaitu bahwa beliau berpendapat, piutang yang berada di kekuasaan dan genggamannya orang lain tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana pernyataan beliau yang telah dicantumkan oleh penulis pada bab I.

Akan tetapi, piutang yang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya ialah merupakan piutang yang bersifat *ghairu marjū al-adā'*. Menurut beliau, harta piutang adalah harta yang berada di tangan dan di bawah kekuasaan orang lain bukan di tangan atau kekuasaan pemiliknya, karena pemiliknya tidak dapat menggunakan, mengelola atau mentransaksikan hartanya apabila harta tersebut berada dalam kekuasaan dan gengggaman orang lain akan tetapi harta itu dimanfaatkan dan digunakan orang lain. Karenanya harta tersebut tidak termasuk dalam status *al-milk al-tām* (kepemilikan sempurna).

Namun sebaliknya, piutang yang bersifat *marjū al-adā'*, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya ketika pemilik piutang menerima kembali piutangnya dan hanya diwajibkan sekali saja walaupun harta tersebut berada di

kekuasaan dan genggaman penghutang dalam waktu yang lama. Hal ini beliau tegaskan dalam kitabnya *al-Muwattha'*:

“... وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةً وَاحِدَةً.”¹⁸⁷

“...Dan apabila piutang tersebut berada di bawah kekuasaan penghutang dalam waktu beberapa tahun lamanya, kemudian pemilik piutang menerima piutangnya, maka ia hanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya hanya sekali saja”

Berdasarkan apa yang telah ditegaskan oleh Imam Mālik dalam kitabnya, hal ini mengacu kepada *hadīts* Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan dari para sahabat-sahabatnya, antara lain adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.¹⁸⁸

“Menceritakan kepada kami Abū Bakar berkata, menceritakan kepada kami Mahdī dari Sufyān dari Abī al-Zanād dari ‘Ikrimah berkata: Tidak ada kewajiban zakat atas hutang.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.¹⁸⁹

“Menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubāb, dari ‘Abdullah bin al-Muammal, dari Ibn Abī Mulaikah, dari ‘Āisyah telah berkata: Tidaklah diwajibkan zakat padanya (piutang) sampai ia menggenggamnya”.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ
وَلَا الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.¹⁹⁰

¹⁸⁷ Al-Imam Mālik bin Anas, *Loc. Cit.*,

¹⁸⁸ Abī Bakar ‘Abdullah bin Muhammad bin Ibrāhīm Ibn Abī Syaibah, *Al-Mushannaf Ibn Abī Syaibah* (Riyādh: Dār al-Rusd Nāsyirūn, 2004), Juz IV, h. 264

¹⁸⁹ *Ibid.*,

¹⁹⁰ *Ibid.*,

“Menceritakan kepada kami Abū Muā’wiyah, dari Hajjāj, dari ‘Athā’ telah berkata: Tidak ada kewajiban untuk berzakat bagi yang memiliki piutang dan orang yang berhutang”.

B. Imam Syāfi’ī.

1. Biografi Imam Syāfi’ī dan Latar Belakang Pendidikannya.

Nama lengkap Imam Syāfi’ī adalah Abū ‘Abdullah Muhammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin ‘Utmān bin Syāfi’ bin Sāib bin ‘Ubaid bin ‘Abdi Yazīd bin Hāsyim bin Abdul Mutthalib bin ‘Abdi Manāf bin Qushay bin Kilāb bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghālib.¹⁹¹ Dan ibunya bernama Fāthimah binti ‘Abdullah bin Husain bin Hasan bin ‘Alī bin Abī Thālib.¹⁹²

Beliau dilahirkan di kota Gaza, tepatnya pada Jum’at siang bulan Rajab pada tahun 150 H.¹⁹³ Pada tahun inipula wafatnya Abū Hanīfah. Dan beliau wafat pada malam Jum’at setelah salat Isya’ di Mesir pada akhir bulan Rajab tahun 204 H, dan saat itu beliau berumur 54 tahun dan beliau dikebumikan di suatu tempat yang bernama *al-Maqtham*.¹⁹⁴ Beliau dibawa ibunya pindah ke kota Makkah pada saat berumur 2 tahun dan kota itulah beliau tumbuh dan mulai mempelajari ilmu agama.¹⁹⁵ Imam Syāfi’ī menikah dengan seorang wanita yang bernama Hamdah binti Nāfi’ bin ‘Anbasah bin ‘Amr bin ‘Utmān bin ‘Affān. Dan dari

¹⁹¹Muhammad bin Ahmad bin Utmān Al-Dzahabī, *Op.Cit.*, h. 5.

¹⁹²Muhammad bin Idris al- Syāfi’ī, *Op.Cit.*, h. 3.

¹⁹³Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Khalkān, Juz IV, *Op.Cit.*, h. 3.

¹⁹⁴Muhammad bin Umar bin Husain al-Rāzi, *Irsyād al-Thālibīn Ilā al-Manhaj al-Qawīm Fī Bayān Manāqib al-Syāfi’ī* (Mesir: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1987), h. 34.

¹⁹⁵Muhammad bin Ahmad bin Utmān Al-Dzahabī, *Op.Cit.*, Juz X, h. 6.

pernikahannya tersebut beliau dikaruniai 4 orang anak, yaitu: Abū Utmān Muhammad bin Muhammad al-Syāfi'ī, Abū Hasan Muhammad bin Muhammad al-Syāfi'ī, Fāthimah dan Zainab.¹⁹⁶

Imam Syāfi'ī dibesarkan di bawah asuhan ibunya dalam keadaan miskin dan yatim, dikarenakan pada saat beliau lahir ayahnya sudah wafat pada saat masih muda. Akan tetapi keadaan tersebut tidak membuatnya patah semangat dan putus asa, keadaan yang demikian malah membuat beliau semangat, gigih dan terus berusaha. Hal tersebut dibuktikan dengan pada saat beliau berumur 7 tahun, beliau telah hafal *al-Qurān* di bawah bimbingan gurunya yang bernama Ismāil bin Qusthantīn, seorang guru besar bidang ilmu *al-Qur'ān* bagi masyarakat Makkah pada saat itu. Tak hanya itu guru-guru Imam Syāfi'ī di kota Makkah banyak sekali di antaranya Sufyān bin 'Uyaynah seorang ulama *hadīts*, Muslim bin Khālid al-Zinjī seorang ulama *fiqh*, Sa'id bin Sālim al-Qaddāh, Daud bin 'Abdurrahman al-Athār, 'Abdul Majīd bin 'Abdul 'Azīz Abū Daud dan masih banyak lagi.¹⁹⁷

Pada masa awal pendidikannya, Imam Syāfi'ī lebih tertarik untuk mempelajari sastra Arab dan bait-bait syair. Beliau mempelajari dan menghafal syair-syair kabilah Hudzail, karena kabilah ini terkenal dengan kefasihan dan keindahan sastranya. Imam Syāfi'ī mempelajari ilmu sastra dan bahasa selama 20 tahun dan beliau berkata: “*Aku mempelajari ilmu sastra dan bahasa hanya untuk membantuku dalam memahami fiqh*”.¹⁹⁸

¹⁹⁶Muhammad bin Umar bin Husain al-Rāzi, *Op.Cit.*, h. 57.

¹⁹⁷Ali Jum'ah Muhammad, *Op.Cit.*, h. 29.

¹⁹⁸Ahmad bin Husain Al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī* (Mesir, Dār al-Turāts, 1970) Juz II, h.

Banyak sekali syair-syair yang telah keluar dari lisan Imam Syāfi'ī. Syair-syair beliau pada saat ini telah dikumpulkan menjadi sebuah kitab yang bernama “*Dīwān al- Syāfi'ī*” dan tak hanya itu, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abī Bakar bin Khalkān banyak sekali menuliskan dalam kitabnya *Wafīyyāt al-A'yān Wa Abnā' Abnā' al-Zamān* syair yang diriwayatkan dari al-Hāfidz Abū Thāhir al-Salafī.

Pada saat umur beliau 13 tahun, beliau telah hafal kitab *hadīts al-Muwattha'* karya Imam Mālik dan beliau ingin pergi ke kota Madinah untuk *mentalaqqi* hafalan yang ada dikepalanya langsung di depan hadapan Imam Mālik. Hal yang menakjubkan pun terjadi, pada awalnya Imam Mālik tidak percaya akan hal itu dikarenakan umur beliau pada saat itu masih sangat terlalu muda, Imam Mālik pun menyuruh beliau untuk *mentalaqqikan* hafalannya, tatkala Imam Mālik mendengar hafalan beliau, Imam Mālik pun terkagum-kagum karena kefasihan dan keindahan bacaanya. Dan Imam Syāfi'ī belajar dengan Imam Mālik selama 16 tahun dari tahun 163 H sampai 199 H.¹⁹⁹ Selain belajar dengan Imam Mālik, beliau juga belajar dengan ulama-ulama lain, di antara Ibrāhīm bin Sa'ad al-Anshari, 'Abdul 'Azīz bin Muhammad al-Darawardī, Ibrāhīm bin Abī Yahyā al-Aslamī, Muhammad bin Sa'īd bin Abī Fudaik, 'Abdullah bin Nāfi' al-Shāigh.²⁰⁰

Pada tahun 184 H, beliau berangkat ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu di sana. Beliau belajar dengan Muhammad bin al-Hasan teman Abū Hanīfah pencetus mazhab Hanafī. Bersamanya beliau mempelajari seluruh karangangan kitab Muhammad bin al-Hasan. Dan tak hanya itu, beliau pun sangat dalam

¹⁹⁹*Loc. Cit.*,

²⁰⁰*Ibid.*, h. 30.

mempelajari mazhab Abū Hanīfah. Selain belajar dengan Muhammad bin al-Hasan, beliau juga belajar dengan ulama'-ulama' Baghdad antara lain, Waqī' bin al-Jarrāh, 'Abdul Wahhāb bin 'Abdul Majīd al-Tsaqafī, Abī Usāmah Hammād bin Usāmah al-Kūfī, Ismāīl bin Ulayyah dan keempat guru-gurunya tersebut adalah *huffādz hadīts-hadīts* Rasulullah S.A.W.²⁰¹

2. Pola Pemikiran dan Metode *Istidlāl* Imam Syāfi'ī.

Dalam perkembangan ilmu *ushūl al-Fiqh*, dikenal adanya dua aliran. Aliran yang pertama ialah *Syāfi'īyyah* dan *Jumhūr al-Mutakallimīn*. Dan yang kedua ialah aliran *Fuqahā'*. Aliran yang pertama membangun *ushūl fiqh* mereka dengan secara teoritis tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah *furū'*. Dalam membangun teori, aliran ini menerapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik *naqlī* maupun berbagai mazhab, sehingga teori tersebut adakalanya sesuai dengan teori *furū'* adakalanya tidak. Sedangkan aliran yang kedua ialah yang dianut oleh ulama'-ulama' yang bermazhab Hanafī. Aliran ini membangun teori *ushūl al-Fiqh*nya dipengaruhi oleh masalah-masalah *furū'*. Artinya, mereka tidak membangun suatu teori kecuali telah melakukan analisis terhadap masalah-masalah *furū'* yang berlaku dalam mazhab mereka. Dalam menetapkan teori tersebut, apabila terjadi pertentangan antara kaidah hukum dan *furū'* yang ada, maka kaidah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum *furū'* tersebut.²⁰²

Imam Syāfi'ī dikenal sebagai seorang ulama' yang bergelar *rihālah fi thalabi al-fiqh* (orang yang berkelana untuk menuntut ilmu *fiqh*). Di antara kota

²⁰¹ *Loc. Cit.*,

²⁰² Ahmad Sanusi, Sohari, *Op. Cit.*, h. 9 et seq.

dan negeri yang beliau pernah kunjungi antara lain, Makkah, Madinah, Irak, Yaman dan Mesir. Hal inilah yang membuat pengetahuan beliau dalam ilmu agama, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Beliau menyaksikan sendiri kehidupan masyarakat perdesaaan dan masyarakat perkotaan seperti di Irak dan Yaman. Dan hal inilah salah satu faktor yang membuat beliau memiliki dua pandangan atau pendapat, yaitu *qaul al- qadīm* (paendapat yang lama) dan *qaul al- jadīd* (pendapat yang baru). *Qaul al- qadīm* terdapat dalam kitabnya *al-Hujjah* yang beliau tulis di Irak, sedangkan *qaul al- jadīd* terdapat dalam kitabnya *al-Umm* yang beliau tulis di Mesir.

Adanya dua pandangan dan pendapat ini, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi *ijtihād* Imam Syāfi'ī. Keadaan di Irak dan di Mesir sangat berbeda sehingga membawa pengaruh kepada *ijtihād* dan pendapat-pendapat Imam Syāfi'ī.²⁰³

Dalam menetapkan hukum, Imam Syāfi'ī berpegang pada *al-Qur'ān*, *al-sunnah*, *ijmā'* dan *qiyās*. Hal ini beliau tegaskan didalam kitab *ushūl fiqhnya al-Risālah*:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَلٍّ أَوْ حَرَمٍ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةِ الْعِلْمِ الْخَبْرُ
فِي: الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ.²⁰⁴

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah *al-Kitāb* (*al-Qur'an*), *as-Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyās*...”

1. *Al-Qur'ān* dan *al-Sunnah*.

²⁰³Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 124. et seq.

²⁰⁴Imam Mālik bin Anas, *Loc.Cit.*,

Imam Syāfi'ī menempatkan *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah* berada dalam satu tingkatan. Beliau menempatkan *al-sunnah* sejajar dengan *al-Qur'ān*, karena menurut beliau, *al-sunnah* banyak memiliki peran sebagai penjelas *al-Qur'ān* dalam hal-hal yang bersifat *mujmal* (global). Akan tetapi, kekuatan *al-Sunnah* secara terpisah tidak sekuat *al-Qur'ān*. *Al-Sunnah* adalah ucapan, perbuatan, sifat dan persetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah S.A.W merupakan wahyu yang turun dari Allah S.W.T. Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (*Al-Quran*) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (Q.S. Al- Najm: 3-4).

Dalam pelaksanaannya, Imam Syāfi'ī menempuh cara, bahwa apabila dalil di dalam *al-Qur'ān* sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *hadīts mutawātir*. Jika tidak ditemukan dalam *hadīts mutawātir* ia menggunakan *khbar āhād*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *dzhāhir al-Qur'ān* atau *al- Sunnah* secara berturut. Dengan teliti beliau mencari *mukhashshish* dari *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah*. Dan apabila beliau tidak menemukan *dzhāhir al-Qur'ān* dan *al- Sunnah* serta *mukhashshishnya*, maka beliau akan mencari apa yang pernah dilakukan Rasulullah S.A.W atau keputusannya. Kalau tidak ditemukan juga, maka ia mencari lagi bagaimana pendapat ulama' sahabat. Jika ditemukan ada *ijmā'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapinya, maka hukum itulah yang beliau gunakan. Akan tetapi beliau mensyaratkan hendaklah seluruh para sahabat sepakat atas hukum tersebut, namun apabila ada di antara para sahabat yang

berbeda pendapat, maka Imam Syāfi'ī akan *mentarjihkan* dengan dalil yang lain.²⁰⁵ Selanjutnya, apabila setelah menempuh seluruh cara-cara yang telah disebutkan di atas namun tidak diketemukan dalil *nashnya*, maka beliau mempunyai prinsip dalam mazhabnya yaitu:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ وَالْأَصْلَ فِي الْمَضَارَّةِ التَّحْرِيمُ²⁰⁶

“Bahwa hukum asal pada sesuatu yang ada manfaatnya hukumnya adalah boleh dan hukum asal pada sesuatu yang ada kejelekan/bahaya maka hukumnya adalah dilarang”.

Akan tetapi, Imam Syāfi'ī dalam menggunakan *khabar āhād* dalam beristidlāl, beliau menetapkan beberapa syarat dalam menggunakan *khabar āhād* sebagai berikut:

- 1) Perawinya *tsiqqah* (terpercaya) dan terkenal jujur dalam perkataannya.
- 2) Perawinya berakal dan memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya *dhābith*.
- 4) Perawinya mendengarkan sendiri *hadīts* itu dari orang yang menyampaikannya.
- 5) Perawinya tidak menyalahi *hadīts* yang diriwayatkan oleh para ahli dalam bidang *hadīts*.²⁰⁷

2. *Ijma'*.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa apabila para mujtahid bersepakat atas suatu pendapat pada kehalalan atau keharaman, boleh dan tidak boleh, atau pada

²⁰⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 130.

²⁰⁶Alī Jum'ah Muhammad, *Op.Cit.*, h. 33.

²⁰⁷Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syāfi'ī Hayātuhu Wa Ashrihi Ārā'uhu Wa Fiqhihi* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 2008), h. 233.

satu perbuatan yang disertai keridhaan dari mereka serta bersandarkan dari *nash*, maka hal tersebut menjadi sebuah *ijma'*.²⁰⁸

Dalam mazhab Syāfi'ī bahwa tidak dapat dikatakan *ijma'* kecuali berdasarkan dari suatu dalil, baik dalil tersebut diketahui atau tidak. Dan yang dimaksud dalil itu ialah dalil akal dalam hukum-hukum, *nash al-Qur'ān* dan *al-Sunnah*, perbuatan dan persetujuan Rasulullah S.A.W dan *qiyās*.²⁰⁹

Imam Syāfi'ī hanya mengambil *ijma' bayānī* dalam dasar hukum dan menolak *ijma' sukūti*. Alasannya karena *ijma' bayānī* merupakan kesepakatan yang berdasarkan *nash* dan berasal dari seluruh *mujtahid* secara jelas dan tegas. Sedangkan *ijma' sukūti* bukanlah kesepakatan seluruh *mujtahid*, karena suatu perkataan/pendapat tidak dinisbatkan kepada orang yang diam, karena diamnya seseorang terkadang mengandung kemungkinan bahwa ia setuju dan kemungkinan ia tidak berijtihad dengan kejadian yang ada.²¹⁰

3. *Qiyās*.

Dalam menjadikan *qiyās* sebagai dasar hukum, Imam Syāfi'ī memiliki pandangan yang berada di tengah-tengah. Beliau tidak memberatkan dalam *qiyās* seperti Imam Mālik dan tidak mempermudah seperti Imam Abū Hanīfah. Karena itu Imam Syāfi'ī memiliki pandangan bahwa *qiyās* mempunyai kedudukan yang penting dalam '*amaliyah al-Fiqhiyyah*. Sehingga beliau menjadikan *qiyās* dan *ijtihad* dengan satu arti. Hal ini beliau tegaskan dengan pernyataannya:

²⁰⁸Muhammad bin Idris al- Syāfi'ī, *Op.Cit.*, h. 27.

²⁰⁹*Ibid*, h. 29.

²¹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 276 et.seq.

“*Ijtihād adalah qiyās*”

Imam Syāfi’ī adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyās* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyās* dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Sebagai dalil penggunaan *qiyās*, Imam Syāfi’ī mendasarkan pada firman Allah S.W.T yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (Q.S. Al-Nisā’: 59).

Imam Syāfi’ī menjelaskan bahwa maksud kalimat “*kembalikan kepada Allah dan rasulnya*” yaitu *qiyās*kanlah kepada salah satu dari *al-Qur’ān* dan *al-Sunnah*.

3. Karya dan Murid Imam Syāfi’ī serta Perkembangan Mazhabnya.

Yāqūt al-Hamuwī menghitung karya-karya Imam Syāfi’ī mencapai 147 kitab.²¹²

²¹¹Alī Jum’ah Muhammad, *Loc.Cit.*,

²¹²Muhammad bin Idris al- Syāfi’ī, *Op.Cit.*, h 5.

Muhammad Abū Zahrah mengatakan dalam kitabnya *Al-Syāfi'ī Hayatu Wa Ashrihi Ārāhu al-Fiqhiyyah* bahwasannya kitab-kitab Imam Syāfi'ī terbagi menjadi dua bagian:

- a. Kitab atau karya beliau yang ditulis dan dinisbahkan kepadanya, seperti: *al-Umm*, *al-Risālah*, *Ikhtilāf al-'irāqiyīn*, *Ikhtilāf Mālik* dan *Ikhtilāf 'Alī Wa 'Abdullah Ibn Mas'ūd*.
- b. Kitab atau karya beliau yang dinisbahkan kepada murid-muridnya, seperti kitab ringkasan dari fatwa dan pendapat Imam Syāfi'ī, yaitu kitab *Mukhtashar al-Buwaithī* dan *Mukhtashar al-Muzinī*.²¹³

Berdasarkan pembagian di atas maka jelaslah bahwa kitab yang ditulis langsung oleh Imam Syāfi'ī, isi dalam kitab itu, teks, makna, susunan kata dan disusun dengan sistematika penulisan dari diri pribadi beliau. Sedangkan, kitab yang dinisbahkan kepada murid-muridnya merupakan ringkasan dan pemahaman yang didengar oleh murid-murid beliau pada saat proses belajar dan mengajar. Dan isi, makna dan teks yang ada didalam kitab itu merupakan dari pribadi murid-muridnya.

Adapun kitab-kitab yang beliau tulis sendiri yaitu:

- a. *Al-Risālah al-Qadīmah* yaitu yang dikenal dengan kitab *al-Hujjah*.
- b. *Al-Risālah al-Jadīdah*.
- c. *Ikhtilāf al-Hadīts*.
- d. *Ibthāl al-Istihsān*.
- e. *Ahkām al-Qur'ān*.

²¹³Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 161.

- f. *Bayādh al-Fardh.*
- g. *Shifah al-Amr Wa al-Nahy.*
- h. *Ikhtilāf al-Mālik Wa al-Syāfi'ī.*
- i. *Ikhtilāf al- 'Irāqiyīn.*
- j. *Ikhtilāf Muhammad bin Husain.*
- k. *Fadhāil al-Quraisī.*
- l. *Al-Umm.*
- m. *Kitāb al-Sunan.*

Murid-murid Imam Syāfi'ī banyak sekali dan berasal dari penjuru dunia dan merekalah yang memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam penyebaran mazhab yang beliau bangun. Murid-murid beliau, sebagian mereka ada yang menyebarkan mazhabnya ke Baghdad, Irak, Khurasan hingga ke Mesir. Adapun murid-murid beliau yang terkenal antara lain, Abū 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, Abū Ibrāhīm Ismā'īl bin Yahya al-Muzinī (264 H), Abū Muhammad Rabī bin Sulaimām al-Marādī (270 H), Abu Ya'qūb Yūsuf bin Yahyā al-Buwaithī (232 H), Abū Hafsh Harmalah bin Yahyā bin 'Abdullah (243 H), 'Abdullah bin Zubair al-Hamidī (219 H) dan masih banyak lagi.²¹⁴

Berkat jasa-jasa murid-murid Imam Syāfi'ī yang berasal dari penjuru dunia, maka tersebarlah mazhab beliau diseluruh dunia. Di antara negara yang menganut mazhab Imam Syāfi'ī antara lain: Syam, Mesir, Hijaz, Irak, Khurasan dan termasuk Negara Indonesia.²¹⁵ Kalau kita melihat praktik ibadah dan muamalah di

²¹⁴Muhammad bin Umar bin Husain al-Rāzi, *Op.Cit.*, h. 48.

²¹⁵Bahri Ghazali, Djumaris, *Op.Cit.*, h. 80.

Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syāfi'ī. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor:

- a) Adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan di antara kaum muslimin ada yang melaksanakan ibadah haji, sebagian mereka ada yang bermukim disana untuk menuntut ilmu. Guru-guru mereka adalah ulama'-ulama' yang bermazhab Syāfi'ī dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan dan menyampaikan ilmunya.
- b) Hijrahnya kaum muslimin dari Hadramaut Yaman ke Indonesia merupakan salah satu faktor tersebarnya mazhab Syāfi'ī. Ulama' dari Hadramaut Yaman adalah bermazhab Syāfi'ī.
- c) Pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman Islam mengesahkan dan menetapkan mazhab Syāfi'ī menjadi haluan hukum di Indonesia.
- d) Para pegawai jawatan dahulu, hanya terdiri dari ulama' yang bermazhab Syāfi'ī, karena belum ada yang lainnya.²¹⁶

4. Pendapat Imam Syāfi'ī Tentang Zakat Bagi Harta Piutang.

Berkaitan dengan zakat harta piutang, para ulama' kontemporer mengklasifikasikan zakat dengan akad sosial, seperti *infāq*, *shadaqah*, *hibah* dan lain sebagainya. Dalam kajian mazhab *Syāfi'īyyah* berpendapat bahwa harta piutang yang berada di tangan dan kekuasaan orang lain wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap tahunnya. Karena menurut beliau, harta piutang yang ada pada genggamam atau kekuasaan orang lain, harta tersebut masih berstatus *milik al-tām* (kepemilikan sempurna atau penuh). Karena pada hakikatnya harta tersebut

²¹⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 136.

merupakan milik pemberi hutang walaupun harta tersebut tidak ada pada genggamannya dan kekuasaannya karena pada hakikatnya sejumlah harta piutangnya akan dikembalikan kepadanya. Hal ini sebagaimana yang Imam Syāfi'ī tegaskan dalam kitab *al-Umm*, yang telah dicantumkan pada bab I. Dalam hal ini Imam Syāfi'ī bersandarkan kepada ayat *al-Qur'ān* yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ... ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka...” (Q.S. Al-Taubah: 103).

Dan hal inipun sesuai dengan *qāidah ushūl* yang berbunyi:

الْعَبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.²¹⁷

“Yang menjadi perhatian dalam menentukan hukum keumuman suatu lafaz bukan karena kekhususan suatu sebab”.

Berdasarkan penjelasan dari seorang *muhadits*, *faqīh* dan *ushūlī* Abū Muhammad ‘Alī bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalūsī mengatakan dalam kitabnya *al-Muhallā bi al-Atsār*, bahwa yang dimaksud dengan piutang dalam pendapat Imam Syāfi'ī di atas adalah piutang yang berada dalam genggamannya dan kekuasaan orang yang orang membenarkan piutang itu, dapat dipercaya dan berusaha untuk melunasinya, yaitu piutang *marjū al-adā’*. Akan tetapi apabila piutang tersebut merupakan piutang *ghairu marjū al-adā’* yaitu piutang yang berada di bawah kekuasaan orang yang mengakui piutang itu, akan tetapi sulit dan menunda-nunda untuk pembayaran atau orang yang menyangkal/mengingkari, maka piutang semacam ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya.²¹⁸ Hal ini

²¹⁷Abdul Wahhāb Khallāf, *Op.Cit.*, h. 108.

²¹⁸Abū Muhammad ‘Alī bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalūsī, *Al-Muhallā Bi al-Atsār*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), h. 222.

berdasarkan kepada *hadīts-hadīts* yang diriwayatkan oleh para sahabat, antara lain yaitu:

مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيَّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مَلِيئٍ
فَعَلَى صَاحِبِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَعْدُمٍ فَلَا زَكَاتَ فِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ
زَكَاتُ السَّنِينَ الَّتِي مَضَتْ.²¹⁹

Diriwayatkan dari sanad Ibn Juraij berkata, bahwa Sa'id bin Musayyab berkata: Apabila piutang ada pada orang yang maka diwajibkan bagi pemilik piutang untuk mengeluarkan zakatnya, namun apabila piutang ada pada orang yang maka tidak diwajibkan zakat padanya sampai menggenggam piutangnya dan haruslah ia mengeluarkannya setiap tahun-tahun yang telah lalu.

مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ فَمَا كَانَ فِي
دَيْنٍ ثِقَةٍ فَاجْعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ وَ مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظُنُونٍ فَلَا زَكَاتَ فِيهِ
حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ.²²⁰

Diriwayatkan dari sanad 'Abdullah bin 'Umar, bahwasannya beliau berkata: Keluarkanlah zakat harta kalian setiap tahunnya, harta piutang yang ada pada orang yang dapat diharapkan pembayarannya maka jadikanlah piutang itu seperti harta yang ada di dalam genggamamu. Dan harta piutang yang ada pada orang yang tidak diharapkan pelunasannya, maka tidak ada zakat di dalamnya sampai pemilik piutang tersebut menggenggamnya.

²¹⁹ *Ibid.*,

²²⁰ *Ibid.*,

BAB IV ANALISIS

A. Persamaan Pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī Tentang Zakat Harta Piutang.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada BAB sebelumnya, maka kita dapat mengetahui persamaan antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī. Persamaan pendapat antara kedua imam mazhab ini adalah:

Pertama. Kedua imam mazhab ini memiliki pendapat bahwa harta piutang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah piutang yang bersifat *marjū al-adā'*. Sedangkan, piutang yang bersifat *ghairu marjū al-adā'* tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya.

Kedua, Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī memiliki pendapat yang sama yaitu, zakat baru wajib dikeluarkan apabila harta tersebut telah mencapai *nishāb (bulūgh al-nishāb)*.

Ketiga, Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī memiliki pendapat yang sama yaitu, zakat baru wajib dikeluarkan apabila harta tersebut berstatus *al-milk al-tām* (kepemilikan sempurna) dan tidak wajib dikeluarkan apabila harta tersebut berstatus *milk al-nāqishah* (kepemilikan yang lemah).

Keempat, Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī memiliki pendapat yang sama yaitu, zakat baru wajib dikeluarkan apabila harta tersebut merupakan *al-māl al-nām* (hartanya berkembang), seperti hewan ternak yang dapat melahirkan, buah-buahan dan biji-bijian yang akan menuai panen, perniagaan yang terus berputar, maka ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya.

B. Perbedaan Pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī Tentang Zakat Piutang.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada SUB BAB sebelumnya, maka akan kita dapati beberapa perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī dalam zakat harta piutang. adapun perbedaan pendapat antara kedua imam mazhab tentang zakat piutang adalah sebagai berikut:

Pertama. Menurut pandangan Imam Mālik, bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi harta piutang. Menurutnya, harta piutang adalah harta yang berada di tangan dan di bawah kekuasaan orang lain bukan di tangan atau kekuasaan pemiliknya, karena pemiliknya tidak dapat menggunakan, mengelola atau mentransaksikan hartanya apabila harta tersebut berada dalam kekuasaan dan gengggaman orang lain akan tetapi harta itu dimanfaatkan dan digunakan orang lain. Karenanya harta tersebut tidak termasuk dalam status *al-milk al-tām* (kepemilikan sempurna). Ketidakwajiban untuk mengeluarkan zakat pada harta piutang, beliau telah menegaskan dalam kitabnya *al-Muwattha'*.

Berseberangan dengan pendapat Imam Mālik, menurut Imam Syāfi'ī bahwa apabila seseorang memiliki piutang yang ada di genggamam atau kekuasaan orang lain, maka harta itu wajib dizakati setiap tahunnya. Perbedaan pendapat ini dikarenakan Imam Syāfi'ī memiliki pandangan tersendiri dalam mengartikan *milk al-tām*. Menurut beliau, harta piutang yang ada pada genggamam atau kekuasaan orang lain, harta tersebut masih berstatus *milk al-tām* (kepemilikan sempurna atau penuh). Karena pada hakikatnya harta tersebut merupakan milik pemberi hutang walaupun harta tersebut tidak ada pada genggamam dan kekuasaannya.

Kedua. Imam Mālik juga beristidlāl dengan mengqiyāskan piutang dengan zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Artinya, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan baru wajib dikeluarkan zakatnya setelah waktu panen, begitupun dengan piutang, baru wajib dikeluarkan zakatnya ketika harta itu telah ada pada genggamannya.

Selanjutnya, Imam Syāfi'ī dalam mewajibkan zakat atas harta piutang beliau beristidlāl dengan mengqiyāskannya dengan zakat *tijārah* (harta perniagaan). Artinya, apabila seseorang yang memiliki harta perniagaan atau barang titipan yang berada di tangan orang lain wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut beliau, seluruh ulama' sepakat bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dihasilkan dari perniagaan walaupun harta perniagaan tersebut terkadang hanyalah berbentuk nominalnya saja dan tidak ada bentuk fisiknya. Dan alasan beliau dalam hal ini adalah karena pemilik piutanglah yang memiliki harta tersebut, sedangkan penghutang hanya menikmati dan menggunakan harta pinjaman yang sebenarnya harta itu bukanlah miliknya dan yang nantinya harus ia kembalikan kepada pemiliknya. Oleh sebab itu harta tersebut masih tetap berstatus *al-milk al-tām* (kepemilikan yang sempurna). Hal ini sebagaimana telah beliau tegaskan di dalam kitab *al-Umm*.

Ketiga, Imam Mālik berpendapat bahwa bagi harta piutang hanya diwajibkan satu kali zakat saja apabila harta piutang tersebut telah ia terima dari penghutang. Sedangkan pendapat Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa harta piutang wajib dikeluarkan zakatnya di setiap tahunnya walaupun harta tersebut dalam kuasa orang lain dan seakan akan harta piutang itu berada dalam kuasanya.

C. Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī Tentang Zakat Piutang.

Sebagaimana yang telah tertulis pada BAB I, Syekh Muhammad al-Madanī dalam bukunya *asbāb ikhtilāf al-fuqahā'*, membagi sebab-sebab *ikhtilāf* itu kepada empat macam, yaitu:

5. Pemahaman *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah* Rasulullah S.A.W.
6. Sebab-sebab khusus tentang *al-Sunnah* Rasulullah SAW.
7. Sebab-sebab yang berkenaan dengan *qāidah-qāidah ushūliyyah* atau *fiqhiyyah*.
8. Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah* Rasulullah S.A.W.

Berdasarkan pembagian di atas, selanjutnya penulis akan menguraikan penyebab yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara kedua imam mazhab tersebut. Adapun penyebabnya antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama. Perbedaan antara kedua imam mazhab dalam memahami *al-Qur'ān* dan *qāidah-qāidah ushūliyyah* atau *fiqhiyyah*. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami ayat *al-Qur'ān* dalam surat al-Taubah ayat 103. Menurut Imam Mālik bahwa ayat tersebut menunjukkan *'umūm al-lafdz* (keumuman lafaz). Dan alasan beliau tentang ketidakwajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta piutang setiap tahunnya adalah kekhususan sebab. Menurutnya, *wurūd al'ām* (keumuman suatu lafaz) dapat dibatasi dengan kekhususan suatu sebab, yaitu piutang. Sedangkan menurut Imam Syāfi'ī, keumuman ayat itulah yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi siapapun yang merdeka, memiliki kepemilikan penuh dan harta tersebut mencapai *nishāb*. Dan berdasarkan ayat di atas pula menurut Imam Syāfi'ī tidak ada pengkhususan harta, baik harta tersebut ada di dalam kekuasaan

orang lain ataupun tidak. Dan Rasulullah S.A.W menyuruh para pekerjanya untuk mengambil harta zakat dari orang yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat tanpa adanya perintah untuk bertanya apakah orang tersebut memiliki hutang ataupun piutang, hal ini telah dijelaskan dalam beberapa *hadīts*. Dan berdasarkan ayat di atas pula beliau mewajibkan zakat atas harta orang gila dan anak kecil.

Kedua. Perbedaan pandangan antara kedua imam mazhab dalam mengartikan *milk al-tām*. Menurut Imam Mālik, zakat wajib dikeluarkan apabila harta tersebut berstatus *al-milk al-tām* (kepemilikan sempurna) dan pengertian *al-milk al-tām* adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mentransaksikan dan mengelola apa yang dimiliki. Dan zakat tidak diwajibkan apabila kepemilikan itu berstatus *milk al-nāqishah*, yaitu seseorang tidak dapat mengelola dan dan mengambil manfaat dari hartanya. Dan hal ini berlaku pada harta piutang, walaupun dalam kepemilikan dari pemilik asli, akan tetapi ia tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari hartanya dikarenakan harta tersebut berada di kekuasaan atau genggamannya orang lain. Sedangkan dalam pandangan Imam Syāfi'ī, *al-milk al-tām* (kepemilikan sempurna) siapa saja dapat menyandang status kepemilikan sempurna atau penuh. Hal ini beliau juga tegaskan bahwa orang gila (kurang waras) atau anak kecil pun mereka dapat menyandang status ini. Oleh sebab itu kewajiban untuk mengeluarkan zakat diwajibkan atas mereka. Dan menurut beliau hanya hamba sahaya yang tidak dapat menyandang kepemilikan sempurna, karena harta mereka adalah di bawah kepemilikan tuan atau majikannya (*milk al-nāqishah*).

Ketiga. Perbedaan antara kedua imam mazhab tentang *al-maqīs ‘alaih* (yang di*qiyā*skan kepadanya). Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī dalam hal ini menggunakan metode *istidlāl* dengan *qiyās*. Imam Mālik tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya atas zakat harta piutang dengan meng*qiyā*skan zakat harta piutang dengan zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan (*al-zurū’ wa al- tsimār*). Sedangkan Imam Syāfi’ī mewajibkan zakat atas harta piutang dengan meng*qiyā*skan zakat harta piutang dengan zakat perniagaan (*‘urūdh al-tijārah*).

Keempat. Perbedaan pendapat antara kedua imam mazhab tentang rahasia dan tujuan zakat, apakah zakat merupakan suatu ibadah *mahdhah* (murni) seperti salat ataukah suatu hak yang wajib diberikan kepada *mustahiq* yang terdapat pada harta *muzakī* ?. Menurut Imam Mālik, zakat merupakan suatu hak (harta) untuk *mustahiq* yang melekat pada harta dan harus dikeluarkan oleh *muzakī*. Dan kaitannya dengan harta piutang ialah, bahwa pemilik harta piutang dianggap seperti seseorang yang sebagian hartanya hilang dan tidak di bawah kekuasaannya pada saat hartanya di dalam kekuasaan orang lain, oleh sebab itulah Imam Mālik tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat atas harta piutang. Dan alasan Imam Mālik tidak mewajibkannya adalah mempertimbangkan kemaslahatan pemberi hutang dari beberapa sisi yaitu, terkadang ia memberikan hutang dikarenakan untuk membantu dan menolong orang yang sedang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan menurut Imam Syāfi’ī, zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dikeluarkan bagi seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun, oleh karenanya harta piutang merupakan hak dan

milik dari pemilik aslinya dan wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat, sedangkan peminjam hanya memakai, menggunakan dan menikmati harta yang merupakan bukan hak dan miliknya. Menurut Imam Syāfi'ī dalam masalah ini terjadi dua pertentangan antara hak Allah S.W.T dan hak manusia, sudah tentu hak Allah S.W.T yang lebih berhak untuk didahulukan.

Kelima. Perbedaan pendapat antara kedua imam mazhab tentang objek zakat, apakah zakat berkaitan dengan *'ain al-māl* (wujud harta) ataukah berkaitan dengan *dzimmah al-māl* (tanggungannya pemilik pada harta) ?. Menurut pendapat Imam Mālik, bahwa zakat berkaitan dengan *'ain al-māl* (wujud harta) bukan *dzimmah al-māl* (tanggungannya pemilik pada harta). Kaitannya dengan piutang ialah, harta piutang baru diwajibkan untuk dikeluarkan apabila harta tersebut ada dan nampak wujudnya, sedangkan dalam harta piutang, bentuk dan wujudnya tidak ada pada kekuasaan pemiliknya akan tetapi berada pada kekuasaan peminjamnya. Dan Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa, zakat berkaitan dengan *dzimmah al-māl* (tanggungannya pemilik pada harta) bukan pada *'ain al-māl* (wujud harta), walaupun harta piutang tidak ada bentuk dan wujudnya, tetapi harta tersebut dalam kekuasaan pemiliknya dan hak kepemilikannya berada dalam tanggungannya. Oleh sebab itu kewajiban untuk mengeluarkan zakat tetap melekat pada dirinya.

Berdasarkan pemaparan di atas dan terlepas dari perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī, penulis lebih cenderung dan setuju terhadap pendapat Imam Syāfi'ī yang mewajibkan zakat bagi harta piutang dengan beberapa alasan yang antara lain ialah:

Pertama, *al-Khurūj min al-Khilāf* (keluar dari peselisihan). Pada alasan ini penulis bersandar kepada *qāidah fiqh* yang berbunyi:

أَخْرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ وَفِي لَفْظِ آخِرِ الْأَخْرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ أَوْلَى وَأَفْضَلُ
“Keluar dari suatu perselisihan itu dianjurkan. Dan dalam lafaz lain dikatakan:
Keluar dari suatu perselisihan itu lebih mulia dan lebih baik”.

Kedua, mendahulukan kepentingan umum/orang banyak ketimbang kepentingan individual/pribadi. Sebagaimana diketahui bahwa zakat adalah suatu kewajiban atas seorang muslim yang memiliki kelebihan harta yang telah mencapai *haul* dan *nishāb*, kemudian harta tersebut akan didistribusikan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya). Yang tujuannya antara lain untuk mensejahterakan dan menghilangkan kemiskinan di atas bumi ini dan mengangkat kesenjangan sosial antara orang yang hidup dengan serba kecukupan dan orang yang serba kekurangan. Sedangkan harta piutang merupakan harta seseorang yang dipinjam dan berada pada kuasa orang lain serta dirasakan manfaatnya oleh orang lain tersebut.

Berdasarkan pengertian keduanya maka penulis berkesimpulan bahwa dalam kaitannya dengan harta piutang adalah zakat untuk kepentingan mayoritas umat demi membangun kesejahteraan bersama sedangkan harta piutang merupakan hak atau kepentingan individual yaitu antara pemberi piutang dan penerima hutang dan dalam hal ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan kepentingan umat. Karena pada dasarnya dalam suatu perbuatan baik itu terbagi menjadi dua yaitu perbuatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pelakunya dan dirasakan oleh orang lain disekitarnya dan perbuatan yang hanya dirasakan oleh pelakunya saja. Maka menurut penulis perbuatan yang manfaat serta kebaikannya

dapat dirasakan oleh orang lain lebih dan mulia dibandingkan dengan perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan pelakunya saja. Dalam ini penulis mengacu pada *qāidah fiqh* yang berbunyi:

الْتَفْعُ الْمَتَعَدَى أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

“Manfaat yang dapat dirasakan orang banyak itu lebih baik dari pada manfaat yang dapat dirasakan oleh segelintir orang”.

Dan *qāidah fiqh* yang senada juga ialah:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan umum lebih didahulukan atas kemaslahatan yang khusus”.

Ketiga, karena pemberi piutang merupakan kategori orang yang mampu dan kaya. Adapun kaitannya dengan harta piutang adalah bahwa pemberi hutang dapat dikatakan orang yang berkecukupan pada saat hartanya dipinjamkan untuk orang lain, tidaklah pemberi hutang memberikan pinjaman kepada penerima hutang kecuali ia dalam keadaan tidak berkecukupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Persamaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang zakat piutang yaitu, **pertama**, Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī berpendapat, bahwa piutang *marjū' al-adā'* merupakan piutang yang wajib dizakatkan, akan tetapi piutang *ghairu marjū' al-adā'* tidak wajib mengeluarkan zakatnya. **Kedua**, Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī berpendapat, bahwa zakat diwajibkan atas seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai kadar *nishāb*. **Ketiga**, Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī berpendapat, bahwa zakat diwajibkan atas seseorang yang memiliki harta yang berstatus *milk al-tām* (kepemilikan sempurna atau penuh). **Keempat**, Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī berpendapat, bahwa zakat diwajibkan atas seseorang yang memiliki *māl al-Nām* (harta yang berkembang).
2. Perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī tentang zakat piutang yaitu, **pertama**, menurut pandangan Imam Mālik, bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi harta piutang. Karena harta piutang tidak termasuk dalam status *al-milk al-tām* (kepemilikan sempurna). Sedangkan, menurut pandangan Imam Syāfi'ī, bahwa pemilik piutang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat untuk harta piutangnya. Karena harta piutang masih termasuk dalam status *al-milk al-tām* (kepemilikan sempurna). Dan hanya hamba sahaya

yang tidak dapat menyangang status ini. **Kedua**, Imam Mālik beristidlāl dengan mengqiyāskan piutang dengan zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan baru wajib dikeluarkan zakatnya setelah waktu panen, begitupun dengan piutang, baru wajib dikeluarkan zakatnya ketika harta itu telah ada pada genggamannya. Sedangkan, Imam Syāfi'ī mewajibkan zakat atas zakat piutang beliau beristidlāl dengan mengqiyāskannya dengan zakat *tijārah* (harta perniagaan). Dan harta perniagaan atau barang titipan yang berada di tangan orang lain wajib dikeluarkan zakatnya. **Ketiga**, Imam Mālik berpendapat bahwa bagi harta piutang hanya diwajibkan satu kali zakat saja apabila harta piutang tersebut telah ia terima dari penghutang. Sedangkan pendapat Imam Syāfi'ī bahwa harta piutang wajib dikeluarkan setiap tahunnya, berbeda dengan pendapat Imam Mālik yang mewajibkannya hanya sekali saja ketika ia telah menerima piutangnya.

3. Penyebab yang melatarbelakangi perbedaan antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī yaitu:

Pertama. Perbedaan antara kedua imam mazhab dalam memahami *al-Qur'ān* dan *qāidah-qāidah ushūliyyah* atau *fiqhiyyah*. **Kedua**. Perbedaan pandangan antara kedua imam mazhab dalam mengartikan *milik al-tām*. **Ketiga**. Perbedaan antara kedua imam mazhab tentang *al-maqās 'alaih* (yang diqiyāskan kepadanya). **Keempat**. Perbedaan pendapat antara kedua imam mazhab tentang rahasia dan tujuan zakat,

apakah zakat merupakan suatu ibadah *mahdhah* (murni) seperti salat ataukah suatu hak yang wajib diberikan kepada *mustahiq* yang terdapat pada harta *muzakī* ?. **Kelima.** Perbedaan pendapat antara kedua imam mazhab tentang objek zakat, apakah zakat berkaitan dengan *'ain al-māl* (wujud harta) ataukah berkaitan dengan *dzimmah al-māl* (tanggung jawab pemilik pada harta) ?.

B. Saran.

1. Hendaklah para pengelola zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kiranya mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang zakat secara terperinci. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 memberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat hanya kepada BAZNAS. Dan dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan secara umum bahwa zakat itu dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan syariat Islam, sedangkan kedua imam mazhab ini merupakan rujukan syariat Islam.
2. Agar harta zakat dapat dikumpulkan, dikelola dan didistribusikan secara optimal, kiranya BAZNAS mendata penghasilan setiap warga Indonesia dalam hal ini dapat berkerjasama dengan Menteri Perpajakan Indonesia. Dan tidak hanya perseorangan warga Indonesia saja, badan hukum pun turut dapat diambil sebagian hartanya untuk dimasukkan kedalam harta zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Āsyūr, ‘Alī. *5000 Hikmah Min Kalām al-Imām ‘Alī*. Beirut: Muassasah al-Tārikh al-‘Arabī, 2005.
- Abdul Hādī, Yūsuf bin Hasan. *Irsyād al-Sālik Ilā Manāqibi Mālik*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2009.
- Abdul Wahab, Afif. *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1995.
- Abī Syaibah, Abī Bakar ‘Abdullah bin Muhammad. *Al-Mushannaḥ*. Riyādh: Dār al-Rusd Nāsyirun, 2004.
- Abū Zahrah, Muhammad. *Al-Syāfi ‘ī Hayātuhu Wa Ashrihi: Ārā’uhu Wa Fiqhihi*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2008.
- _____. *Mālik Hayātuhu Wa Ashrihi: Ārā’uhu Wa Fiqhihi*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2008.
- Al-Andalūsī, Abū Muhammad ‘Alī. *Al-Muhallā Bi al-Atsar*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2003.
- Al-Ashfahānī, Ahmad bin Abdullah. *Hilyah al-Auliya’ Wa Thabāqāt al-Ashfiyā’ā*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Asqalānī, Ibn Hajar. *Fath al-Bārī Bi Syarh Shahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Bakrī, Sayyid. *T’ānah al-Thalibīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Ba’lī, Abdul Hāmid. *Iqthisādiyyah al-Zakāh Wa ‘T’ibaru al-Siyāsah al-Māliyyah Wa al-Naqdiyyah*, alih bahasa Muhammad Abqari Abdullah Karim. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Al-Baihaqī, Ahmad bin Husain. *Manāqib al-Syāfi ‘ī*. Mesir: Dār Turāts, 1970.
- _____. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2003.
- Al-Baijurī, Ibrāhīm. *Hasyiyah al-Syekh Ibrāhīm al-Baijurī*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2007.
- Al-Bujairomī, Sulaimān bin Muhammad. *Tukhfah al-Habīb ‘Alā Syarh al-Khatīb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā’īl. *Shahīh al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 2002.

- Al-Dhimiyaṯhī, Muhammad. *Al-Jawāhir al-Lu'lu'iyah*. Beirut: al-Yamamah, 1998.
- Al-Dhimiyaṯhī, 'Abdul Mu'min. *Al-Matjar al-Rābih Fī Tsawāb al-'Amal al-Shālih*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- Al-Ghazzī, Ibn Qāsim. *Fath al-Qarīb al-Mujīb Fī Syarh Alfādz al-Taqrīb*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005.
- Al-Harrānī, Abdul Salām bin Taimiyah. *Al-Muntaqā Min Akhbār al-Musthafā*. Dār al-Thaibah, 1999.
- Al-Dimasyqī, Muhammad bin Abdurrahman. *Rahmah al-Ummah Fī Ikhtilāf al-Aimmah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987.
- Al-Dzahabī, Muhammad bin Ahmad. *Siyar A'lām al-Nubalā'*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996.
- Al-Jazirī, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ah*. Kairo: Dār al-Hadīts, 2004.
- Al-Jizānī, Muhammad bin Husain. *Dirāsah Wa Tahqīq Qāidah al-Ashl Fi al-'Ibādah al-Man'u*. Saudi Arabia: Dār Ibn Jauzī, 1421 H.
- Al-Kāf, Hasan bin Ahmad. *Taqrīrāt al-Sadīdah Fi Masāil al-Mufīdah*. Surabaya: Dār 'Ulūm al-Islāmiyah, 2004.
- Al-Ma'barī, Ahmad Zainuddin. *Fath al-Mu'īn Bi Syarh Qurratu al-'Ain Bi Muhimmāti al-Dīn*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004.
- Al-Nawawī, Muhyi al-Dīn. *Al-Adzkār al-Nawawiyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- _____. *Kitāb al-Majmū' Syarh Muhadzab Li al-Syairāzī*. Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1998.
- Al-Qārī, 'Ali bin Shulthān Muhammad. *Mirqāh al-Mafātih Syarh Misykāh al-Mashābih*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.
- Al-Qāsimī, Muhammad Jamāluddīn. *Mahāsin al-Ta'wīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1957.
- Al-Qurthubī. *Al-Jāmi' Li al-Ahkām al-Qur'an*. Riyādh: Dār 'Alim al-Kutub, 2003.
- Al-Rāzī, Muhammad bin 'Umar. *Irsyād al-Thālibīn Ilā al-Manhāj al-Qawīm Fī Bayān Manāqib al-Syāfi'i*. Mesir: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah, 1987.
- Al-Sajistāni, Sulaimān bin al-Asyats. *Sunan Abī Daud*. Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamiyah, 2009.

- Al-Shābūnī, Muhammad ‘Ali. *Shofwah al-Tafāsīr*. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Al-Shin’ānī, Abdul Razaq bin Hammām. *Al-Mushannaf*. Beirut: Al-Majlis al-‘Ilmī, 1970.
- Al-Suyuthī, Abdurrahman. *Al-Asybah Wa al-Nadzāir*. Beirut: Dār al-Fikr, 2011.
- Al-Syāfi’ī. *Al-Umm*. Al-Mashūrah: Dār Wafā’, 2001.
- _____. *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- Al-Syi’lānī, Abdurrahman bin Abdullah. *Ushūl al-Fiqh al-Imām Mālik: Adillatuhu al-Naqliyah*. Riyādh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Wathaniyah Atsnā’ al-Nasyr, 1224 H.
- Al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Al-Syairāzī, Ibrāhīm bin Ishāq. *Kitāb al-Tanbīh Fi Furū’ al-Fiqh al-Syāfi’ī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Syaukānī, Muhammad bin ‘Alī. *Nail al-Authār Syarh Muntaqā al-Akhbār*. Lebanon: Bait al-Afkār al-Dauliya, 2004.
- Al-Thabarī. *Tafsīr al-Thabarī Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wīl al-Qur’ān*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994.
- Al-Tirmidzī, Muhammad bin ‘Isā. *Al-Jāmi’ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- Al-Zaila’ī, Jamāluddīn. *Nashbu al-Rāyah Li al-Ahādits al-Hidāyah*. Jeddah: Dār al-Qoblah Li al-Tsāqafah al-Islāmiyah, 2014.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr Fi al-Aqīdah Wa al-Syarī’ah Wa al-Minhāj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- _____. *Al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Suara Agung, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazali, Bahri dan Djumaris. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Sinar Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hanafie, A. *Usul Fiqh*. Jakarta: Widjaya, 1989.
- Hidayat, Yayat. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Bandung Mulia Press, 2008.
- Kamal, Abdul Malik. *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*. Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2013.
- Kaukasāl, Ismā'il. *Thagayyur al-Ahkām Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000.
- Khafīf, 'Ali. *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā'*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2014.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. *Ilmu Ushūl al-Fiqh Wa Khalāsah al-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996.
- Khalkān, Ahmad bin Muhammad. *Wafīyyāt al-'A'yān Wa Abnā' al-Zamān*. Beirut: Dār al-Shādir, 1978.
- Khumedi Ja'far, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Tt: Permatanet Publishing, 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokus Media, 2008.
- Mālik. *Al-Muwattha'*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Meolong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2001.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2004.
- Muhammad, 'Alī Jum'ah. *Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2012.
- Muhammad bin Mukrim. *Lisān al-'Ārab*. Beirut: Dār al-Shādir, 1997.
- MZ. Labib. *Kuliah Ibadah*. Surabaya: Tiga Dua, 2000.
- Pamungkas, Imam dan Maman Surahman. *Fiqh 4 Mdzhab*. Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sumaith, Zein bin Ibrāhīm. *Al-Manhāj al-Sawī Syarh Ushūl Tharīqah al-Sādah Āl Bā'alawī*. Tarīm: Dār al-‘Ilmi Wa al-Da’wah, 2008.
- Syafei’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Media Group, 2012.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Pustaka Logos, 1997.
- Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Sumber Jurnal

- Masnun Tahir & Suziana Elly Triantini. 2015. “Integritas Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204>. (28 Mei 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Mohammad Rusfi. 2016. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hal Kepemilikan Harta”, *Al-‘Adalah*, Vol XIII, No. 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2016, (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>. (3 Juni 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Muhammad Hasan. 2015. “Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal”, *Al-‘Adalah*, Vol XII, No. 4, Muhammad Hasan, “Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal”, *Al-‘Adalah*, Vol XII, No. 2, 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/219>. (7 Juni 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

- Nasruddin & Dewani Romli. 2011. “Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia” *Al-‘Adalah*, Vol X, No. 1, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2011, (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/241>. (28 Mei 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- M. Sidiq Purnomo. 2011. “Reformulasi Maslahah al-Mursalah al-Syāthibi”, *Al-‘Adalah*, Vol X, No. 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2011), (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/260>. (8 Agustus 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

